



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KADERISASI KEPEMIMPINAN ORGANISASI PARTAI
(STUDI KASUS PARTAI DEMOKRAT, TAHUN 2010)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

TARWIN

0806449481

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KETAHANAN NASIONAL

KAJIAN STRATEJIK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN

JAKARTA

JULI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : TARWIN
NPM : 0806449481
Tanda Tangan :
Tanggal :

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Tarwin
NPM : 0806449481
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Kekhususan Kajian Strategik Pengembangan
Kepemimpinan
Judul Tesis : Analisis Kaderisasi Kepemimpinan Organisasi
Partai (Studi kasus Partai Demokrat, Tahun 2010)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Muhammad Budi Setiawan

()

Ketua Sidang : Dr. Tafsir Nurchamid

()

Penguji : Dr. Amy S. Rahayu, M.Si.

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Budi Setiawan, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah membantu secara materi kepada penulis dalam menempuh studi di Pascasarjana UI.
3. Prof. DR. Achmad Mubarok, MA. dan beberapa pihak terkait yang mewakili Partai Demokrat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
4. Ibu, Ayah, Istri, kakak dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
5. Sahabat-sahabat saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Seperti kata pepatah yang berbunyi "*Tak ada gading yang tak retak*", begitu pula dengan tesis ini. Namun demikian, saya berharap mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 30 Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarwin
NPM : 0806449481
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Program : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**”Analisis Kaderisasi Kepemimpinan Organisasi Partai
(Studi kasus Partai Demokrat, Tahun 2010)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Tarwin)

ABSTRAK

Nama : Tarwin
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Judul : Analisis Kaderisasi Kepemimpinan Organisasi Partai (Studi kasus Partai Demokrat, Tahun 2010)

Partai politik berperan besar dalam menentukan masa depan sebuah negara demokrasi. Peran partai dalam mengkader dan menyiapkan pemimpin harus diimbangi oleh sistem kaderisasi yang memadai. Sistem kaderisasi yang memadai akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Sebaliknya jika sistem kaderisasi parpol tidak sesuai dengan kebutuhan pemimpin di sebuah negara, maka akan terjadi kepincangan demokrasi, dimana para pemimpin tidak mampu menjalankan amanah seperti yang seharusnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrat, mulai sistem rekrutmen sampai proses kaderisasi kepemimpinannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah sistem rekrutmen anggota Partai Demokrat sudah sesuai dengan ADART dan memiliki kriteria yang jelas, namun untuk rekrutmen kader pemimpin belum mempunyai mekanisme yang standar. Partai Demokrat belum melakukan pengelolaan data anggota dengan baik, sehingga partai tidak memiliki data yang akurat tentang anggota, yang nantinya akan digunakan untuk pemetaan dan pengembangan kader. Dalam rekrutmen kader pemimpin tidak ada kriteria dan mekanisme yang jelas untuk mengatur rekrutmen kader. Partai masih berorientasi pada jangka pendek, sehingga kader-kader pemimpin yang muncul di posisi strategis seperti anggota legislatif dan kepala daerah masih banyak dari kalangan entertainer, *public figur*, pejabat dan mantan pejabat yang kemampuannya masih dipertanyakan.

Secara umum Partai Demokrat sudah berupaya untuk melakukan kaderisasi, tetapi dalam pelaksanaannya masih berorientasi pada jangka pendek. Belum ada database anggota dan kader dan belum jelasnya sistem penjenjangan kader. Kurikulum kaderisasi masih belum berorientasi pada pembekalan dan peningkatan kapasitas kader dalam menjalankan amanahnya, baik dalam partai ataupun pemerintahan, sehingga kurikulum harus direvisi dan terus dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan dan dapat meningkatkan *skills* setiap anggota dan kader.

Kata kunci :
Rekrutmen, kaderisasi, Partai Demokrat

ABSTRACT

Name : Tarwin
Study Program : Studies for National Defense
Title : Analysis of organizational leadership cadre party (case study of Democrat Party, 2010)

Politic Parties play role in determine of democracy state future. The contributions in regeneration and prepare leaders have to counterbalanced a good regeneration system. It will born qualified leaders. If the regeneration system not suitable with need of leaders in a state, it will occurs lameness democracy, that leaders could not do their jobs. This study aimed to analyze the model of leadership regeneration in the Democrat party, from recruitment system to regeneration process. The research is qualitative method with descriptive design.

Result of this study is the recruitment system is in conformity with the Democrat party ADART an has clear criteria, but hasn't done well the management of member data, so that party has no accurate data of members, which will be used for mapping and development of cadres. There is unclear criteria and mechanism to regulate cadre recruitment. The party is still oriented in the short term, so that the cadres of leaders who emerged at the strategic position such as legislative and head of province, most of them whom come from entertainers, public figures, officials and former officials whose capacity is still questionable.

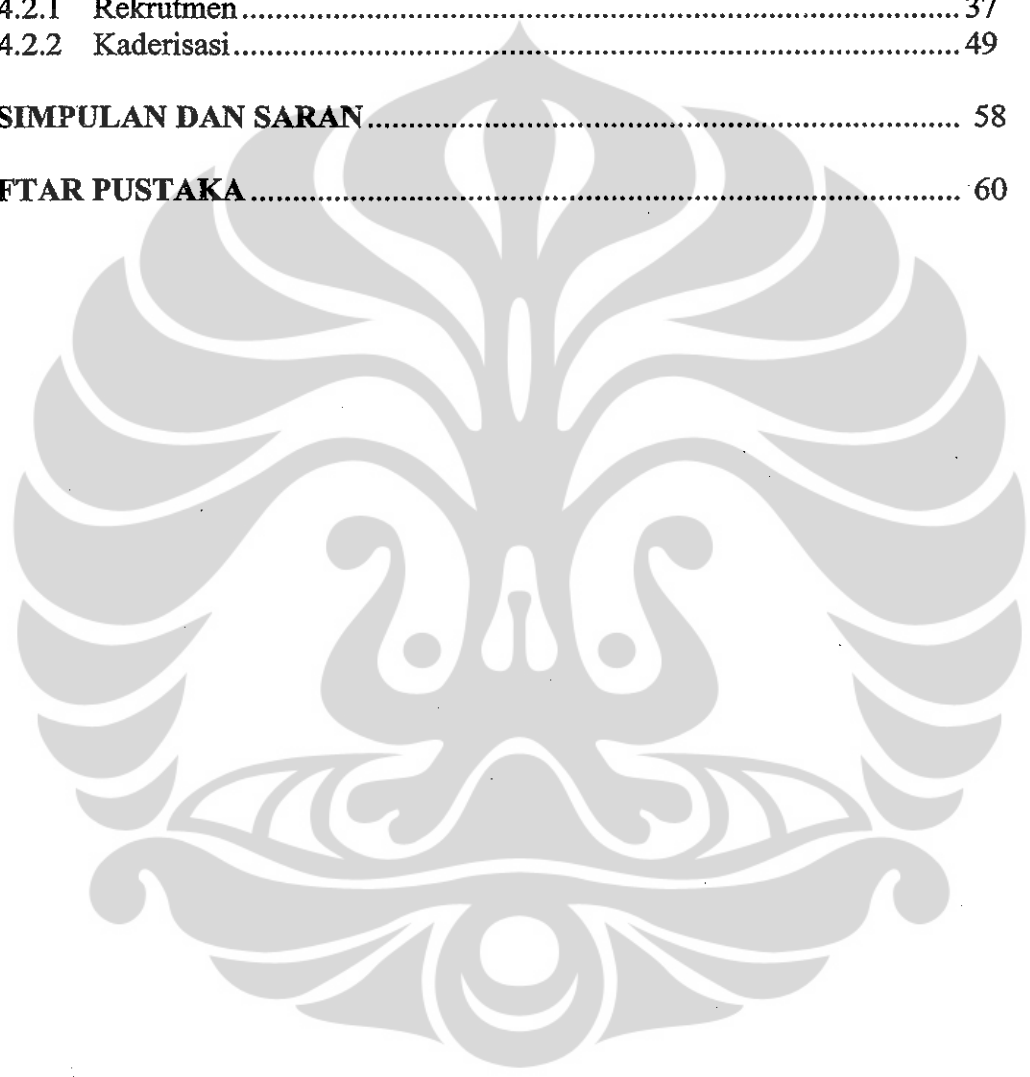
Commonly, Democrat Party has made effort to do regeneration. But in practice the system of cadre training Democrat Party is still short term oriented, which is winning general election (PEMILU). There is no database of members and cadre and unclear cadre ladders system at Democrat Party. Regeneration curriculum hasn't yet have orientation on provision and increasing cadre capacity in running their mandatory, either at the party or at government, so that curriculum should be revised and further developed in order that party is in accordance with necessary and can improve the skills of each member and cadre.

Keywords:
Recruitment, regeneration, Democrat Party

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	5
2. LANDASAN TEORI.....	7
2.1. Politik	7
2.2. Partai Politik	7
2.2.1. Definisi Partai Politik	8
2.2.2. Sejarah Partai Politik	8
2.2.3. Partai Politik Sebagai Sebuah Organisasi	10
2.3. Kaderisasi	11
2.4. Rekrutmen Politik.....	13
2.5. Tipe Partai Politik dan Kaderisasi.....	13
2.6. Kepemimpinan.....	14
2.6.1. Definisi Kepemimpinan	15
2.6.2. Teori Perilaku.....	15
2.6.3. Teori Situasional.....	16
3. METODE PENELITIAN	22
3.1. Pendekatan Penelitian	22
3.2. Sumber Data	22
3.3. Teknik Pengumpulan Data	23
3.4. Pengembangan Validitas	23
3.5. Tahapan Prosedur Penelitian	25
4. PEMBAHASAN	28
4.1. Profil Partai Demokrat	28

4.1.1. Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat	28
4.1.2. Pengesahan Partai Demokrat	30
4.1.3. Visi dan Misi Partai	31
4.1.4. Struktur Organisasi Partai Demokrat.....	33
4.1.5. Program Umum Partai Demokrat	33
4.2. Sistem Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai.....	37
4.2.1 Rekrutmen	37
4.2.2 Kaderisasi.....	49
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Proses Jalinan.....	27
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Partai Demokrat	34



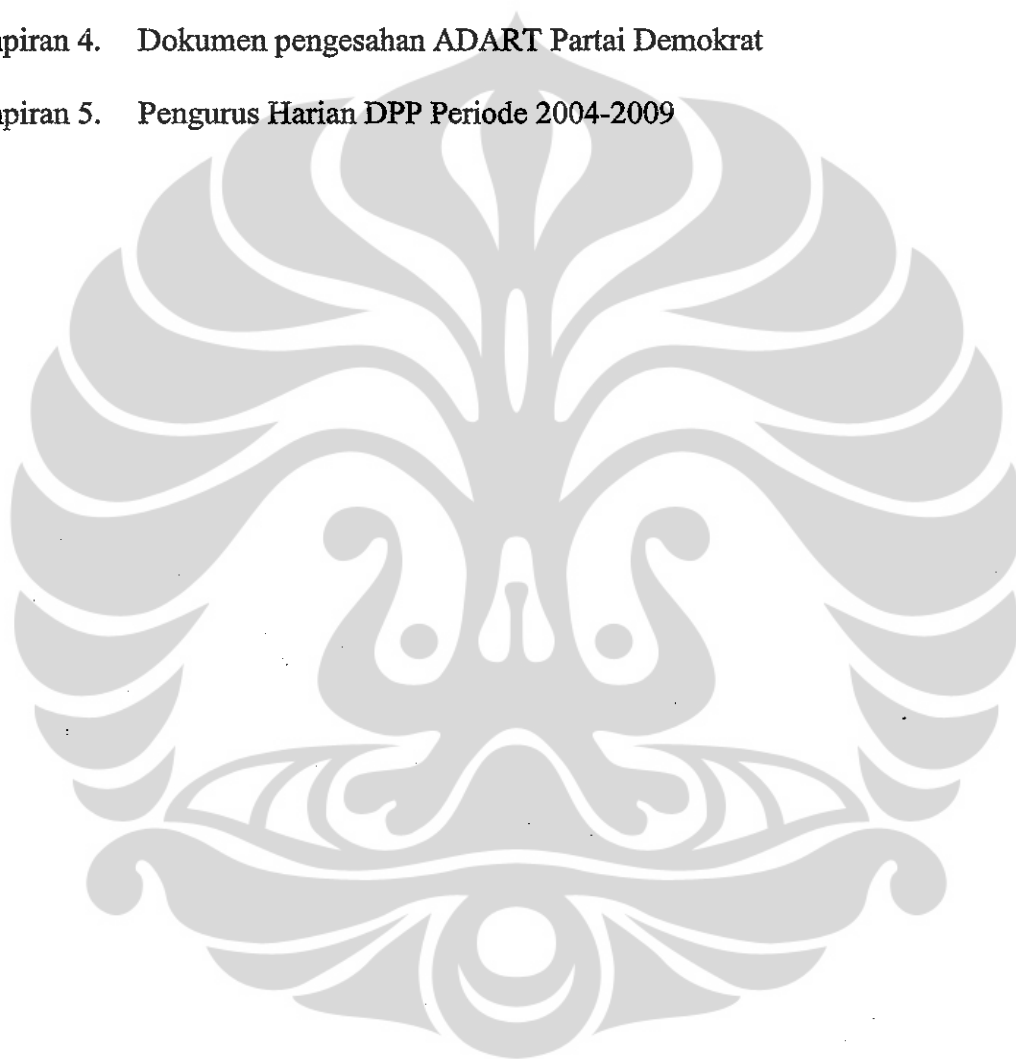
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Operasionalisasi Faktor	17
Tabel .2. Hasil wawancara dan analisis Dokumen.....	18



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hasil wawancara dengan pihak Partai Demokrat
- Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Mantan Ketua BEM Seluruh Indonesia Periode 2008-2009
- Lampiran 3. ADART Partai Demokrat
- Lampiran 4. Dokumen pengesahan ADART Partai Demokrat
- Lampiran 5. Pengurus Harian DPP Periode 2004-2009



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, serta tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi tidak langsung dengan sistem multipartai. Sistem ini mengharuskan rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen memperjuangkan aspirasinya. Wakil-wakil yang duduk di parlemen merupakan representasi dari rakyat. Peraturan perundang-perundangan yang mengatur hajat bangsa ditentukan oleh para wakil rakyat. Sistem multipartai juga mengakibatkan kandidat kepala dan wakil kepala daerah dan negara berasal dari partai politik (parpol).

Dalam hal kepemimpinan, parpol berperan sebagai sarana pembentukan pemimpin-pemimpin bangsa. Para anggota mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri dan potensinya melalui sistem kaderisasi masing-masing partai. Anggota yang mendapat kesempatan dan memiliki potensi dapat menjadi kader partai pilihan dan mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin dari partai. Pendek kata parpol memiliki peran yang sangat penting dan strategis di negara demokrasi seperti Indonesia.

Parpol berperan besar dalam menentukan masa depan sebuah negara demokrasi. Hal tersebut dikarenakan tampuk kepemimpinan berada di atas pundak para pemimpin yang notabene mayoritas berasal dari partai politik. Kita dapat melihat presiden Republik Indonesia dari orde lama (Ir. Soekarno) sampai orde reformasi (Dr. Susilo Bambang Yudhoyono), mereka adalah merupakan kader partai politik. Begitu juga dengan para menternya yang duduk di kabinet, mayoritas berasal dari partai politik. Pada tingkat yang lebih rendah seperti pemerintahan provinsi dan kotamadya/kabupaten juga dikepalai oleh pemimpin yang berasal dari parpol. Sampai

saat ini parpol telah cukup banyak menyumbangkan kader-kadernya untuk jadi pemimpin di pemerintahan.

Peran partai dalam mengkader dan menyiapkan pemimpin harus diimbangi oleh sistem kaderisasi yang memadai. Sistem kaderisasi yang memadai akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Namun, sebaliknya jika sistem kaderisasi parpol tidak sesuai dengan kebutuhan pemimpin di sebuah negara akan terjadi kepincangan demokrasi, dimana para pemimpin tidak mampu menjalankan amanah seperti yang seharusnya.

Parpol juga dituntut mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas untuk menggantikan generasi masa kini. Kemampuan regenerasi parpol sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan yang stabil dan *fair*. Tentunya hal ini juga berlaku untuk Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan ini, Anis Baswedan (2009) mengatakan demokratisasi yang dibangun beberapa tahun terakhir di Indonesia memiliki unsur nilai dan unsur institusi. Apresiasi publik atas nilai keadilan, persamaan hak, kebebasan berekspresi, misalnya, menjadi salah satu tanda hadirnya nilai demokratis. Demokrasi itu sendiri harus dibangun dengan pengembangan institusi politik. Salah satu institusi politik yang penting adalah partai politik. Parpol harus dikelola secara modern. Parpol harus mulai membebaskan diri dari sekadar institusi peserta pemilu, tetapi menjadi supplier pemimpin. Mensuplai pemimpin berarti mempersiapkan masa depan. Privilese yang dimiliki parpol ini menjadi sia-sia ketika regenerasi di parpol tidak berjalan. Peran partai sebagai penyuplai pemimpin politik akan bisa optimal jika parpol itu sendiri menjadi wahana bermunculannya pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin parpol yang sudah "mengabdi" terlalu lama sebagai pimpinan parpol perlu berhenti. Generasi baru perlu didorong untuk tampil dan memimpin partai. Dengan sistem kaderisasi inilah partai melahirkan pemimpin-pemimpin nasional yang akan meneruskan estafet kepemimpinan saat ini.

Berbeda dengan realita, saat ini banyak partai di Indonesia mengalami kesulitan untuk menarik kalangan muda potensial untuk bergabung ke dalam partai. Padahal pemuda adalah generasi yang potensial untuk menjadi pemimpin masa depan.

Kalangan muda yang memiliki kualitas yang dibutuhkan partai, baik karena pendidikan formal yang dimilikinya maupun keahlian organisasi yang terbentuk melalui pengalaman, lebih memilih untuk berkiprah di bidang lain dan tidak mau bersentuhan dengan dunia kepartaian. Jajak pendapat Kompas terhadap kalangan akademisi menunjukkan bahwa hanya 13,9 persen responden yang tertarik terjun ke dunia politik, sementara 84,8 persen lainnya menyatakan tidak tertarik untuk masuk ke bidang ini. Kalangan aktivis *civil society organization* (CSO) juga memiliki sikap yang kurang lebih sama. Meskipun mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai isu-isu publik, karena mereka bergelut dengan berbagai isu tersebut dalam keseharian mereka, tidak banyak yang merasa tertarik untuk masuk ke dalam partai politik (*Kompas*, 19/04/08). Terlebih, kesulitan untuk merekrut kalangan muda dan profesional ini menyebabkan partai menghadapi kendala dalam melakukan regenerasi kepemimpinan dan pengembangan partai menjadi sebuah institusi demokratis yang modern¹.

Hal ini menjadi permasalahan sekaligus tantangan bagi partai politik di Indonesia untuk mempertahankan eksistensinya di dunia perpolitikan. Kreasi dan inovasi dalam rekrutmen dan kaderisasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh parpol. Parpol yang hanya berfikir menang dalam pemilu tanpa memperhatikan regenerasi dapat dipastikan tidak akan berumur lama.

Sebagai salah satu parpol di Indonesia, Partai Demokrat juga harus faham akan hal ini. Terlebih sebagai partai pemenang pemilu, Partai Demokrat setidaknya sudah mendapat kepercayaan yang lebih dari mayoritas pemilih untuk memainkan perannya sebagai saluran aspirasi yang berpihak kepada rakyat. Kepercayaan sebagian besar masyarakat Indonesia harus dijaga dengan terus menampilkan performa kader yang baik, bersih dan profesional dalam jangka panjang. Tidak diragukan lagi kualitas kader yang seperti itu hanya dapat di tampilkan oleh partai-partai yang mapan dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi.

Sebagai partai yang lahir pasca reformasi, capaian Partai Demokrat memang fantastik. Pada pemilu 2009 Partai Demokrat menempati urutan teratas dan

¹ Puskapol UI, "Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia" (Depok : Puskapol FISIP UI, 2008)

memperoleh lebih 20% suara pada pemilihan presiden secara langsung. Apakah capaian prestasi ini didukung oleh sistem rekrutmen dan kaderisasi yang memadai? Ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Tesis ini akan membahas sistem rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrat.

1.2 Perumusan masalah

Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian:

- 1.2.1 Bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam mempersiapkan pemimpin di masa depan?
- 1.2.2 Bagaimana Partai demokrat dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan di tubuh partai?

1.3 Pembatasan masalah

Partai politik merupakan sekumpulan manusia yang terorganisir secara stabil yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Karena elemen utama partai adalah manusia, sehingga kualitas partai politik sangat tergantung dari pengelolaan manusianya, dari rekrutmen sampai proses kaderisasinya. Proses rekrutmen anggota dan kader partai merupakan proses yang sangat penting dan berpengaruh terhadap proses kaderisasi, sehingga keduanya merupakan proses yang saling terkait dan menguatkan. Dalam penelitian ini akan dibahas proses rekrutmen anggota dan kader pemimpin partai dan proses kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat, sehingga diperoleh gambaran utuh model kaderisasi Partai Demokrat. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret-April 2010.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Menganalisis proses rekrutmen anggota dan kader yang dilakukan oleh Partai Demokrat.
- 1.4.2 Menganalisis proses kaderisasi Kepemimpinan yang dilakukan Partai Demokrat.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah; (1) penelitian dapat memperkaya khasanah keilmuan yang tentunya dapat dijadikan salah satu referensi untuk studi-studi berikutnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, (2) hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi ataupun instansi yang konsen terhadap kaderisasi pemimpin, terlebih partai politik, dan (3) dapat dijadikan sebagai studi komparasi bagi partai lain dalam pengkaderan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berisi lima bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi penjelasan tentang latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, serta penjelasan tentang tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian yang digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang meliputi lima pokok bahasan yaitu pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengembangan validitas, serta tahapan prosedur penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Data-data hasil temuan di lapangan disajikan sekaligus dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan makna dari topik penelitian yang dilakukan dan saran atau rekomendasi yang diperoleh atas dampak pokok-pokok temuan penelitian yang dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori untuk analisis kaderisasi kepemimpinan organisasi partai. Peneliti menganalisis dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut, yaitu teori rekrutmen, teori sosialisasi politik, teori organisasi dan teori kepemimpinan.

2.1 Politik

Beberapa sarjana Politik berbeda dalam mendefinisikan politik. Menurut Rod Hague et al " Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya."², sedangkan menurut Andrew Heywood, "Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum untuk mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama."³. Dari uraian tersebut terdapat 5 konsep-konsep pokok, yaitu: Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi.

2.2 Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab dengan lingkungan kita. sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara dan ia baru ada di negara modern.

² Rod Hague et al., *Comparative Government and Politics* (London: Macmillan Press, 1998) hlm.3.

³ Andrew Heywood, *Politics* (London: Macmillan Press, 1997) hlm. 4.

Roy C. Macridis berpendapat bahwa partai politik (parpol) merupakan keharusan dalam kehidupan politik moderen yang demokratis, pengecualiannya hanya pada masyarakat tradisional yang sistem politiknya otoritarian yang pemerintahannya bertumpu pada tentara atau polisi⁴

2.2.1 Definisi Partai Politik

Partai politik adalah perkumpulan (segolongan orang-orang) yang selaras, sehaluan, setujuan (terutama bidang politik), baik berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai terkemuka; maupun berdasarkan partai massa, yaitu parpol yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya (Poerwantana, 1994).

Senada dengan uraian di atas, Miriam Budiarjo (2000), mengartikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka)⁵.

Selain definisi-definisi di atas ada beberapa sarjana politik lain yang mendefinisikan partai politik sebagai berikut: Partai politik menurut Roy C. Macridis (1996) adalah suatu asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik. Partai politik menurut Ichlasul Amal adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

2.2.2 Sejarah Partai Politik

Partai politik pertama-tama dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah dia

⁴ Roy C. Macridis; "Teori-Teori Mutakhir Partai Politik" (Editor : Ichlasul Amal); Penerbit : PT. Tiara Wacana Yogya, tahun 1996, hal 17

⁵ Miriam Budiarjo. "Dasar-dasar Ilmu Politik" (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.160-161

bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah) ataukah terang-terangan menganut azas politik/agama (seperti Sarikat Islam dan Partai Katolik) atau azas politik/sekuler (seperti PNI dan PKI), memainkan peranan penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan keanekaragaman, pola mana diteruskan dalam masa merdeka dalam bentuk sistem multipartai.

Dengan didirikannya Volksraad maka beberapa partai dan organisasi bergerak melalui badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi dalam Volksraad, yakni Fraksi Nasional di bawah pimpinan Husni Thamrin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan "Indonesische Natinale Groep" di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar Volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari partai-partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia, yang merupakan gabungan partai-partai beraliran Islam yang terbentuk pada tahun 1937) dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia, yang merupakan gabungan Organisasi buruh).

Kegiatan partai politik pada zaman pendudukan Jepang dilarang; hanya golongan-golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi. Akan tetapi, satu bulan sesudah proklamasi kemerdekaan, kesempatan dibuka lebar-lebar untuk mendirikan partai politik, anjuran mana mendapat sambutan yang antusias.

Dengan demikian kepartaian kembali ke pola multipartai yang telah dimulai dalam zaman kolonial. Banyaknya partai tidak menguntungkan berkembangnya pemerintahan yang stabil. Pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 membawa penyederhanaan dalam jumlah partai dalam arti bahwa dengan jelas telah muncul empat partai besar, yakni Masyumi, PNI, NU dan PKI. Akan tetapi partai-partai tetap tidak menyelenggarakan fungsinya sebagai mana yang diharapkan. Akhirnya, pada masa Demokrasi Terpimpin partai-partai dipersempit ruang-geraknya.

Dalam masa Orde Baru, partai politik diberi kesempatan untuk bergerak lebih leluasa. Akan tetapi, sesudah diadakan pemilihan umum 1971, di mana Golkar

menjadi pemenang pertama dengan disusul oleh tiga partai besar NU, Parmusi dan PNI, agaknya partai-partai lain harus menerima kenyataan bahwa peranan mereka dalam *decision making process* untuk sementara akan tetap terbatas.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai. Empat partai Islam, yaitu Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, partai Sarikat Indonesia dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Selain dari itu lima partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Pembangunan.^[6] Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multipartai.

2.2.3 Partai Politik Sebagai Sebuah Organisasi

Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut; "Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda"⁷. Dari definisi tersebut secara jelas Sigmund menyatakan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk meraih kekuasaan, sehingga dalam melakukan aktvitasnya memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan organisasi-organisasi lainnya.

Miriam Budiardjo menegaskan bahwa partai politik berbeda dengan gerakan (*movement*). Gerakan merupakan suatu kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang terbatas dan bersifat fundamental, dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat di antara anggota-anggotanya dan dapat meumbuhkan identitas kelompok yang kuat.

⁶ Miriam Budiardjo. "Dasar-dasar Ilmu Politik" (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.171-172

⁷ Sigmund Neumann. "Model Political Parties" dalam *Comparative Parties: A Reader*, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963), h.352.

Organisasinya kurang ketat dibandingkan dengan partai politik. Berbeda dengan partai politik, tidak mengadakan nasib melalui pemilihan umum.

Partai Politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*). Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu "kepentingan" dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Jadi cukup jelas bahwa kelompok kepentingan mempunyai orientasi jauh lebih sempit daripada partai politik, yang karena mewakili pelbagai golongan lebih banyak memperjuangkan kepentingan umum.⁸

2.3 Kaderisasi

Kaderisasi adalah sebuah proses yang sangat penting dalam sebuah organisasi yang dapat menentukan keberlanjutan organisasi tersebut. Setiap organisasi yang baik selayaknya mempunyai program pengkaderan guna mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan visi misi organisasi. Dalam proses kaderisasi, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya agar siap dan mampu mengemban tugas-tugasnya. Program magang akan menguji secara nyata kompetensi masing-masing anggota dalam menjalankan tugasnya. Dari proses inilah organisasi dapat menemukan anggota yang berpotensi untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan menggantikan generasi yang sekarang pada periode berikutnya.

Hadari (1993) mengatakan bahwa kenyataan menunjukkan bahwa tanpa memperoleh kesempatan yang cukup untuk melatih dan mengembangkan diri, dalam memimpin melalui proses belajar dan pengalaman langsung, maka akan banyak kendala dalam mewujudkan kepemimpinan. Setiap pemimpin berkewajiban membantu orang-orang yang dipimpinnya, mengembangkan kemampuan masing-

⁸ Miriam Budiarto. "Dasar-dasar Ilmu Politik" (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.160.

masing, dalara menjalankan kepemimpinan. Pemimpin berkewajiban memberikan kesempatan anggota organisasinya untuk memperoleh pengalaman memimpin. Kemudian berdasarkan pengalamannya perlu memilih seorang/beberapa orang untuk diberi kesempatan memperoleh pengalaman yang intensif dalam memimpin. Kesempatan itu antara lain dengan memberikan jabatan tertentu, dan mengikuti pelatihan. Rangkaian kegiatan tersebut dinamakan proses kaderisasi, yang berisi upaya-upaya mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin.

Lili Romli (2008) mengatakan bahwa setelah proses rekrutmen dilakukan, partai harus melakukan pendidikan politik atau kaderisasi bagi anggotanya, sehingga anggota partai tersebut dapat memahami tujuan-tujuan partai, menginternalisasi nilai-nilai yang dianut oleh partai, dan mempunyai kemampuan atau kualifikasi yang memadai untuk memperjuangkannya.

Kaderisasi Partai Politik dan Teori Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai suatu proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan "budaya politik" yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa.

Seorang ahli sosiologi politik, M.Rush (1992) mendefinisikan bahwa sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenal sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.

Ada beberapa hal yang menghambat proses kaderisasi partai sebagaimana disampaikan oleh Romli (2008) bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi partai politik di Indonesia. *Pertama*, lemahnya kaitan antara kaderisasi dan promosi

kader. *Kedua*, partai belum mempunyai standar dan penjenjangan kaderisasi yang kokoh. *Ketiga*, terbatasnya sumberdaya yang dialokasikan partai bagi kegiatan pengkaderan.

2.4 Rekrutmen Politik

Fungsi rekrutmen berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai *onderbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.⁹

2.5 Tipe Partai Politik dan Kaderisasi

Menurut Ware (1996), kategori partai politik didasarkan pada komposisi dan fungsi anggota dibedakan menjadi dua, yaitu partai kader dan partai massa. Partai kader lebih mengandaikan kualitas anggota, ketaatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Sebaliknya, partai massa cenderung lebih mengandalkan keunggulan jumlah anggota, sehingga berorientasi memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, antara lain dengan menjadi pelindung berbagai

⁹ Miriam Budiarto. "Dasar-dasar Ilmu Politik" (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hl.408-409

kelompok masyarakat. Bagi partai massa anggota dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan partai, termasuk kemenangan pemilu.

Dengan memperhatikan perbedaan pokok antara dua kategori tersebut, jelas bahwa kaderisasi yang dilakukan oleh partai kader akan berbeda dibandingkan dengan kaderisasi yang dilakukan oleh partai massa. Namun, terlepas dari tipe partai yang hendak dibangun, keanggotaan di semua partai pada dasarnya diklasifikasikan secara berjenjang. Secara normatif, perbedaan jenis atau jenjang keanggotaan ini menunjukkan klasifikasi atas kualifikasi anggota atau kader, yang didasarkan pada berbagai faktor. Dalam hal ini partai perlu membuat klasifikasi yang jelas dan konsisten, salah satunya terkait dengan kaderisasi yang harus diikuti oleh anggota di masing-masing jenjang (Romli, 2008).

Selain memperhatikan penjenjangan yang jelas, proses kaderisasi juga membutuhkan pemetaan terhadap jenis keanggotaan di dalam partai. Maurice Duverger membagi keanggotaan partai menjadi dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Keanggotaan langsung diperoleh oleh seseorang dengan mendaftarkan diri secara langsung sebagai anggota partai tertentu, sedangkan keanggotaan tidak langsung diperoleh sebagai konsekuensi dari keanggotaannya di organisasi lain, seperti serikat buruh, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, dan lainnya yang menjadi organisasi sayap (*underbouw*) partai. Anggota yang berasal dari dua jenis keanggotaan berbeda ini tentu membutuhkan *treatment* kaderisasi yang berbeda (Janda, 1993).

2.6 Kepemimpinan

Dalam sebuah organisasi baik dalam skala kecil maupun besar sangat dipengaruhi oleh peran pemimpinnya. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan organisasi yang dipimpinnya. Permasalahannya adalah tidak semua pemimpin dalam organisasi dapat memerankan sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin akan berhasil membawa organisasi yang dipimpinnya menuju kesuksesan jika dia memiliki jiwa kepemimpinan.

2.6.1 Definisi Kepemimpinan

Ralph M. Stogdill mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut: kepemimpinan manajerial adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan tugas dari anggota kelompok (Stoner, 1986:114). Sementara itu menurut Kadarman, dan Jusuf Udaya kepemimpinan didefinisikan sebagai seni atau proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai kelompok (Kadarman et.al, 1992:110). Menurut Kae H. Chung dan Leon C Megginson kepemimpinan didefinisikan sebagai kesanggupan mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu arah tertentu (Kossen, 1986:181). Sedangkan menurut Edwin A. Fleishman kepemimpinan diartikan suatu usaha mempengaruhi orang antar perseorangan (interpersonal) lewat proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan (Gibson, Ivancevich and Donnely, 1987:263). Dari rumusan-rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk tercapainya suatu tujuan tertentu.

2.6.2 Teori Perilaku

Stephen P. Robbins (2003) dalam Perilaku Organisasi mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai deskripsi perilaku:

a. Konsiderasi dan struktur inisiasi

Perilaku seorang pemimpin yang cenderung mementingkan bawahan memiliki ciri ramah tamah, mau berkonsultasi, mendukung, membela, mendengarkan, menerima usul dan memikirkan kesejahteraan bawahan serta memperlakukannya setingkat dirinya. Di samping itu terdapat pula kecenderungan perilaku pemimpin yang lebih mementingkan tugas organisasi.

b. Berorientasi kepada bawahan dan produksi

Perilaku pemimpin yang berorientasi kepada bawahan ditandai oleh penekanan pada hubungan atasan-bawahan, perhatian pribadi pemimpin pada

pemuasan kebutuhan bawahan serta menerima perbedaan kepribadian, kemampuan dan perilaku bawahan. Sedangkan perilaku pemimpin yang berorientasi pada produksi memiliki kecenderungan penekanan pada segi teknis pekerjaan, pengutamaan penyelenggaraan dan penyelesaian tugas serta pencapaian tujuan.

Pada sisi lain, perilaku pemimpin menurut model leadership continuum pada dasarnya ada dua yaitu berorientasi kepada pemimpin dan bawahan. Sedangkan berdasarkan model grafik kepemimpinan, perilaku setiap pemimpin dapat diukur melalui dua dimensi yaitu perhatiannya terhadap hasil/tugas dan terhadap bawahan/hubungan kerja. Kecenderungan perilaku pemimpin pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari masalah fungsi dan gaya kepemimpinan (JAF.Stoner, 1978:442-443).

2.6.3 Teori Situasional

Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan tertentu menurut Sondang P. Siagian (1994:129) adalah (1) Jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas, (2) bentuk dan sifat teknologi yang digunakan, persepsi, sikap dan gaya kepemimpinan, (3) norma yang dianut kelompok, (4) rentang kendali, (5) ancaman dari luar organisasi, (6) tingkat stress, (7) iklim yang terdapat dalam organisasi.

Efektivitas kepemimpinan seseorang ditentukan oleh kemampuan “membaca” situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar cocok dengan dan mampu memenuhi tuntutan situasi tersebut. Penyesuaian gaya kepemimpinan dimaksud adalah kemampuan menentukan ciri kepemimpinan dan perilaku tertentu karena tuntutan situasi tertentu.

Tabel 1. Tabel Operasionalisasi Faktor

No	Faktor yang diamati	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Parameter Penilai
1	Rekrutmen <input checked="" type="checkbox"/> Orientasi <input checked="" type="checkbox"/> Kriteria <input checked="" type="checkbox"/> Pola/Standarisasi	Primer dan Sekunder	Informan, FGD Tim peneliti Parpol PUSKAPOL dan ADART	Wawancara dan Analisis Dokumen	Rekrutmen : - Orientasi (kader) Jangka Panjang - Sesuai dengan ADART - Pola Mengacu kepada ADART
2	Program Pelatihan/kursus Kader <input checked="" type="checkbox"/> Tujuan dan sasaran <input checked="" type="checkbox"/> Implementasi sesuai dengan rencana program <input checked="" type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas <input checked="" type="checkbox"/> Proses transfer nilai-nilai	Primer dan Sekunder	Informan ADART Partai dan Dokumen Program Partai	Wawancara dan Analisis Dokumen Partai	Program Pelatihan : - Tujuan dan sasaran sesuai orientasi kader - Program rutin dan berkesinambungan - Proses transfer nilai sesuai dengan fungsi sosialisasi
3	Kurikulum	Primer	Informan	Wawancara	Ada kurikulum dan materi yang jelas
4	Penjenjangan	Primer	Informan	Wawancara	Penjenjangan terimplementasi
5	Program kaderisasi kepemimpinan	Primer	Informan dan Dokumentasi Program	Wawancara dan Dokumentasi Program	Implementasi program sesuai dengan rencana program
6	Sistem reward dan Punishment	Primer	Inforsorman	Wawancara	Ada mekanisme reward dan punishment yang jelas

Tab 1.2. Hasil wawancara dan analisis Dokumen

No	Faktor yang diamati	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Parameter Penilai
1	Rekrutmen <input checked="" type="checkbox"/> Orientasi <input checked="" type="checkbox"/> Target <input checked="" type="checkbox"/> Kriteria <input checked="" type="checkbox"/> Manajemen Data <input checked="" type="checkbox"/> Pola/Standarisasi <input checked="" type="checkbox"/> Sarana rekrutmen	Primer dan Sekunder	Informan, dan ADART	Wawancara dan Analisis Dokumen	<input checked="" type="checkbox"/> Orientasi rekrutmen anggota sesuai dengan ADART memperbanyak dukungan dan kelestarian partai tapi orientasi jangka pendek (pemilu) <input checked="" type="checkbox"/> Target rekrutmen belum jelas <input checked="" type="checkbox"/> Belum ada database anggota yang akurat dan jelas <input checked="" type="checkbox"/> Kriteria rekrutmen anggota sudah jelas sesuai dengan ADART Partai <input checked="" type="checkbox"/> Kriteria rekrutmen Pemimpin belum jelas <input checked="" type="checkbox"/> Pola rekrutmen sudah sesuai dengan ADART <input checked="" type="checkbox"/> Pola rekrutmen kader pemimpin tidak mengacu pada mekanisme yang jelas <input checked="" type="checkbox"/> Sarana rekrutmen yang digunakan melalui struktur	Rekrutmen : <input checked="" type="checkbox"/> Orientasi (kader) Jangka Panjang <input checked="" type="checkbox"/> Kriteria Sesuai dengan ADART <input checked="" type="checkbox"/> Ada Database anggota <input checked="" type="checkbox"/> Pola Mengacu kepada ADART <input checked="" type="checkbox"/> Kejelasan adanya sarana rekrutmen

No	Faktor yang diamati	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Parameter Penilai
2	Program Pelatihan/kursus Kader <input checked="" type="checkbox"/> Orientasi <input checked="" type="checkbox"/> Tujuan dan sasaran <input checked="" type="checkbox"/> Implementasi sesuai dengan rencana program <input checked="" type="checkbox"/> Frekuensi/intensitas <input checked="" type="checkbox"/> Proses transfer nilai-nilai	Primer dan Sekunder	Informan ADART Partai dan Dokumen Program Partai	Wawancara dan Analisis Dokumen Partai	<input checked="" type="checkbox"/> Orientasi pelatihan adalah adanya perubahan sikap pada kader. Tetapi secara umum pelatihan ditujukan untuk memompa semangat kader untuk pemenangan pemilu. <input checked="" type="checkbox"/> Tujuan Pelatihan anggota memahami nilai-nilai yang dianut partai <input checked="" type="checkbox"/> Implementasi tidak sesuai dengan rencana program (lihat program umum partai) <input checked="" type="checkbox"/> Sebelum menjelang Pemilu 2009, tidak ada program khusus kaderisasi. Pelatihan dilakukan hanya menjelang Pemilu 2009, belum intens dan berkesinambungan <input checked="" type="checkbox"/> Proses transfer nilai masih terhambat pada kader-kader pemimpin yang berasal dari parpol lain. <input checked="" type="checkbox"/>	Program Pelatihan : <input checked="" type="checkbox"/> Orientasi pada perubahan sikap kader menjadi lebih baik <input checked="" type="checkbox"/> Tujuan dan sasaran transfer nilai-nilai yang dianut partai <input checked="" type="checkbox"/> Program rutin dan berkesinambungan <input checked="" type="checkbox"/> Proses transfer nilai sesuai dengan fungsi sosialisasi

No	Faktor yang diamati	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Parameter Penilai
3	Kurikulum	Primer	Informan	Wawancara	<input checked="" type="checkbox"/> Secara substansi materi terdiri dari nilai-nilai kepartaian seperti ideologi, materi keorganisasian dan materi kepemimpinan <input checked="" type="checkbox"/> Belum menyiapkan materi-materi yang disiapkan untuk para kader yang akan menjadi pemimpin dan wakil dari partai di pemerintahan <input checked="" type="checkbox"/> Pelaksanaannya masih belum intens dan kontinu	Ada kurikulum dan materi yang jelas
4	Penjenjangan	Primer	Informan	Wawancara	<input checked="" type="checkbox"/> Belum ada penjenjangan kader secara jelas	Penjenjangan terimplementasi
5	Program kaderisasi kepemimpinan	Primer	Informan dan Dokumentasi Program	Wawancara dan	<input checked="" type="checkbox"/> Belum terimplementasi, kader-kader pemimpin dari produk kaderisasi Demokrat masih	Implementasi program sesuai dengan rencana program

No	Faktor yang diamati	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian	Parameter Penilai
6	Sistem reward dan Punishment	Primer	Informan	Wawancara	<input checked="" type="checkbox"/> Belum ada mekanisme reward dan punishment	Ada mekanisme reward dan punishment yang jelas

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan bagaimana peneliti melaksanakan penelitiannya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Terdiri dari lima pokok bahasan yaitu pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengembangan validitas, serta tahapan prosedur penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Creswell (2003, hlm 21) mengatakan ada tiga pendekatan kualitatif yaitu penelitian partisipasi, penelitian naratif, dan wawancara terbuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terbuka (*open-ended interviewing*) dan *content analysis* (kajian kepustakaan). Menurut Irawan (2006, hlm 60), *content analysis* adalah suatu teknik analisis terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, novel, koran, majalah, dan sebagainya) dan bahan noncetak, seperti musik, gambar dan benda-benda.

Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan parameter analisis. Peneliti menentukan parameter analisis berdasarkan sebuah filosofi bahwa kaderisasi adalah sebuah tahapan proses berupa upaya-upaya untuk mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin.

3.2 Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan yang benar dan nyata, yang dapat dijadikan kajian analisis atau kesimpulan dalam penelitian. Data yang digunakan ada dua jenis, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, misalnya keadaan, kejadian, peristiwa, yang dapat dilihat, didengar, dirasa, diraba atau yang diperoleh dari tangan pertama misalnya responden, saksi, pelaku, pejabat kunci, pelanggar hukum. Dalam penelitian ini yaitu data hasil dari wawancara dengan responden.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang sudah berupa data olahan, seperti rekaman FGD PUSKAPOL yang membahas

tentang sistem rekrutmen anggota dari 10 partai terbesar di Indonesia, ADART, struktur organisasi, dan dokumen-dokumen resmi Partai Demokrat yang lain yang berhubungan dengan kaderisasi.

Data dalam penelitian ini berbentuk data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis. Peneliti memperoleh data melalui beberapa sumber yang diambil secara *purposive*, yaitu :

1. Informan utama diwakili oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat
2. Informan kunci dari luar dan dari dalam Partai Demokrat.
Informan kunci dari dalam diwakili oleh anggota Partai Demokrat, sedangkan dari luar diwakili oleh Ketua BEM Se-Indonesia periode 2008-2009.
3. Perpustakaan PUSKAPOL, bagian administrasi Partai, situs internet, dan lain-lain (data sekunder)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terbuka dan *content analysis*. Pertama, peneliti mengumpulkan data melalui *content analysis* dari berita di media dan literatur pustaka. Setelah itu, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan para informan untuk dapat menggali informasi yang lebih mendalam.

3.4 Pengembangan Validitas

Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian (Sutopo, 2006). Terdapat beberapa cara validitas data yang dilakukan oleh peneliti yaitu triangulasi, penyusunan data base dan penyusunan mata rantai semua bukti penelitian.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu teknik peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pola pikir fenomenologis yang bersifat multiperspektif.

2. Penyusunan database

Terdapat beberapa cara dalam menyusun data base, yaitu sistem *folders*, sistem kumpulan kartu dan sistem kartu potongan informasi (Sutopo, 2006). Teknis penyusunan database yang digunakan peneliti adalah sistem *folders*. Teknis tersebut peneliti lakukan sebagai berikut:

Tahap pertama, peneliti mengatur data, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Catatan Wawancara:

1. Membuat transkrip wawancara
2. Membuat daftar kategori hasil wawancara
3. Merancang penomoran unit-unit hasil wawancara
4. Membuat salinan
5. Memasukkan data kedalam folder
6. Menyajikan data kedalam sajian data

B. Dokumen Resmi Partai:

1. Membuat daftar kategori data
2. Merancang penomoran unit-unit data
3. Membuat salinan
4. Memasukkan data kedalam folder
5. Menyajikan data kedalam sajian data
3. Penyusunan mata rantai semua bukti penelitian

Teknik validitas data yang digunakan peneliti selanjutnya adalah dengan menyusun mata rantai semua bukti penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Sutopo (2006), penyusunan mata rantai semua bukti penelitian ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan reliabilitas informasi penelitian. Teknik ini menggunakan analogi pengadilan. Pengadilan banding tidak memerlukan pengadilan baru, hanya dengan memeriksa kembali catatan mata rantai semua bukti tersebut. Kejelasan kaitan bukti ini memudahkan usaha melakukan penelusuran kembali untuk memeriksa ada atau tidaknya bias dan juga kekeliruan dalam menyusun suatu simpulan penelitian yang telah selesai dilaporkan.

Penyusunan mata rantai dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan validitas data atas data-data yang telah tersusun kedalam kategori, dengan melakukan perbandingan dari data-data yang diperoleh.
2. Data yang telah valid kemudian disusun kedalam sebuah mata rantai tahapan peristiwa dalam penelitian.

3.5 Tahapan Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti beberapa tahapan, yaitu membuat proposal penelitian, melakukan pengumpulan data, mencatat data, mengatur data, melakukan analisis data dan terakhir membuat laporan penelitian.

Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Membuat proposal penelitian

Proposal merupakan rancangan penelitian yang diajukan peneliti, berisi tiga bab yaitu bab 1 sampai bab 3. Bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi landasan teori dan bab 3 berisi metode penelitian. Proposal penelitian telah melalui beberapa kali proses perbaikan-perbaikan bersamaan dengan penelitian di lapangan (paradigma penelitian kualitatif).

b. Melakukan pengumpulan data

Setelah mengajukan proposal penelitian, akhirnya peneliti melakukan pengumpulan data sesuai dengan prosedur yang telah dirancang dengan tetap bersifat lentur dan terbuka sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.

c. Mencatat data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti mencatat data yang diperoleh kedalam dua bagian catatan yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif. Catatan deskriptif merupakan catatan informasi lengkap yang ditulis dengan kalimat lengkap yang dilakukan tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu, sedangkan catatan refleksi merupakan catatan mengenai beragam fikiran yang timbul setelah peneliti membaca semua bagian deskriptif. Penekanan catatan reflektif lebih kepada spekulasi, perasaan, masalah-masalah yang muncul dalam pikirannya, pikiran-pikiran lain, kesan dan bahkan prasangka peneliti sendiri (Sutopo, 2006).

d. Mengatur data

Ketika melakukan pengumpulan data dan mencatat data, bersamaan dengan itu peneliti mengatur data. Teknik pengaturan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem *folders*.

e. Melakukan analisis data

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh melalui wawancara terbuka dan *content analysis* berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Sementara itu sifat analisisnya bersifat induktif.

Analisis induktif dilakukan sebagai berikut (Sutopo, 2006):

1. analisis dilakukan di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data.
2. analisis dilakukan dalam bentuk interaktif.
3. analisis bersifat siklus.

Berdasarkan Sutopo (2006) peneliti melakukan tiga komponen utama dalam proses analisis. Tiga proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mereduksi data

Peneliti melakukan reduksi data dengan menyeleksi, pemfokuskan, menyederhanakan dan mengabstraksi semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan.

2. Menyajikan data

Peneliti membuat narasi hasil penelitian dengan kalimat dan bahasa peneliti berdasarkan reduksi data yang telah dilakukan.

3. Melakukan penarikan simpulan dan verifikasi

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi.

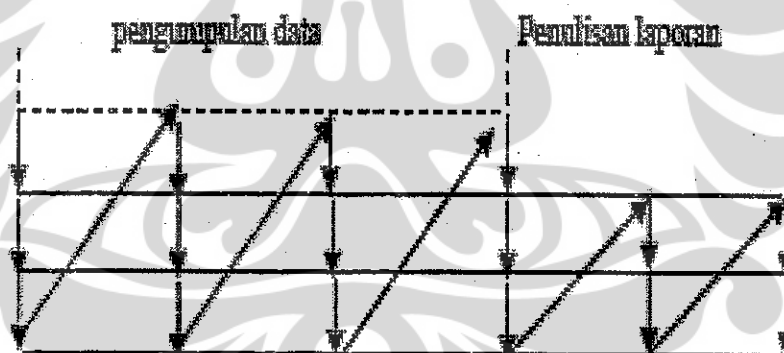
Ketiga proses analisis tersebut dilakukan berulang dan terus-menerus sampai peneliti dapat menarik simpulan akhir yang dilakukan ketika proses pengumpulan data sudah berakhir. Simpulan ini akan diverifikasi agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi yang dilakukan adalah:

1. Aktifitas mengulang atau penelusuran data kembali dengan cepat, seanalogi dengan persidangan banding.

2. Diskusi
3. *Consensus intersubjektif* (saling memeriksa antar teman)

Menurut Sutopo (2006), ada dua jenis proses analisis yang dapat dilakukan, yaitu Proses Jalinan dan Proses Interaktif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses analisis menggunakan Proses Jalinan. Proses tersebut adalah proses hubungan yang mengalir dari tiga komponen pokok serta proses pengumpulan data di lapangan. Prosesnya dilakukan mengalir saling menjalin dan berkelanjutan serta dilakukan sampai pada proses penulisan laporan. Proses Jalinan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Sajian data
4. Penarikan simpulan/verifikasi
5. Membuat laporan penelitian



Gambar 3.1. Proses Jalinan

Sumber : Sutopo, 2006, telah diolah kembali

f. Membuat laporan penelitian

Setelah proses penelitian dilakukan dan diperoleh kesimpulan akhir, akhirnya peneliti melakukan tahap akhir dari semua proses penelitian yaitu membuat laporan penelitian. Laporan penelitian dilakukan dengan membuat laporan sesuai format penulisan tesis Universitas Indonesia.

BAB IV PEMBAHASAN

Secara khusus dalam Bab Pembahasan ini akan dipaparkan profil Partai Demokrat, dari mulai sejarah pembentukan dan pendirian, pengesahan, Visi dan misi, struktur organisasi, dan Program umum Partai Demokrat. Inti dari Bab ini adalah analisis sistem rekrutmen dan kaderisasi Partai Demokrat berdasarkan data hasil penelitian dengan landasan teori yang telah disebutkan pada Bab II.

4.1 Profil Partai Demokrat

Fenomena Partai Demokrat dalam kancah dunia perpolitikan menarik untuk dikaji. Terutama pada Pemilihan Umum 2009, Partai yang dibidani oleh Susilo Bambang Yudoyono (SBY) ini memperoleh suara 20%, tertinggi menyingkirkan partai-partai besar yang cukup lama eksis dalam dunia politik. Padahal sebelumnya partai ini belum begitu diperhitungkan, namun setelah terpilihnya SBY sebagai presiden pada tahun 2004 partai ini melesit seiring dengan populernya presiden SBY. Untuk mengenal Partai Demokrat lebih dekat berikut akan diuraikan sejarah pembentukan dan berdirinya Partai.

4.1.1 Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling publik yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi pemimpin bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi wakil presiden RI tetapi menjadi presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa

terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya teknis administrasi dirampungkan oleh tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY, dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Kemudian, pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatogana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarak, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragih, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh SBY.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang-Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya,

tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan, dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat, sedangkan 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang.

Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.

4.1.2 Pengesahan Partai Demokrat

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM

Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia. Dan pada tanggal 9 Oktober 2001, Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum kongres ini.

4.1.3 Visi dan Misi Partai

Visi Partai

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

Misi Partai

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus proklamasi kemerdekaan berdirinya negara kesatuan republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi
3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.⁵

⁵ Tulisan ini disalin dari AD/ART yang lama

4.1.4 Struktur Organisasi Partai Demokrat



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Partai Demokrat

Sumber : Sutopo, 2006, telah diolah kembali

4.1.5 Program Umum Partai Demokrat

Partai Demokrat termasuk kekuatan politik di Indonesia yang diperhitungkan oleh banyak orang, terbukti pada pemilu 2009. Oleh karena itu tepat kalau Partai Demokrat harus mempersiapkan program umum ke depan. Penyusunan program umum partai adalah merupakan penyiapan bingkai kerja (frame work) bagi jajaran dan kader partai yang senantiasa berada dalam kehidupan masyarakat pluralis. Oleh karenanya program yang disusun, seyogyanya berangkat dari geografis, geopolitik dan geoekonomi serta wawasan partai. Secara garis besar program umum Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

Mengembangkan, Memperkuat dan Membina Partai

Kesuksesan Partai Demokrat mengusung Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Republik Indonesia, sudah menjadi suatu indikator bahwa Partai Demokrat telah diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Walaupun sesungguhnya figur Bapak SBY tidak luput dari keberhasilan besar itu.

Keberhasilan pelaksanaan manajemen partai politik terutama dalam mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran organisasi banyak dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi pada tingkat DPP, DPD dan DPC. Disamping itu kemampuan, loyalitas, keuletan, moralitas dan militansi seorang kader sangat diperlukan bahkan menjadi syarat utama untuk menjadi pimpinan/pengurus partai. Kader partai yang akan dibina tidak hanya dipersiapkan dalam kepemimpinan partai politik, tetapi kader dalam segala lini, termasuk memimpin di masyarakat dan pemerintahan.

Program pengembangan partai untuk tumbuh dan kuat di akar rumput, maka haruslah kita sadar bahwa Partai Demokrat tidak sekedar sebagai wadah perpolitikan saja, tetapi harus berperan sebagai organisasi masyarakat yang peduli pada kehidupan rakyat kecil. Mereka itu yang harus kita angkat harkat dan martabatnya sebagai manusia sesuai kodrat alam. Oleh karena itu program partai mendatang benar-benar berorientasi pada :

1. Manajemen partai harus pada tataran keselarasan, keserasian dan keseimbangan.
2. Manajemen partai haruslah bersih, simpatik, berwibawa, akuntabel, terbuka dan komunikatif.
3. Pembinaan kader dimulai dari struktur organisasi yang terendah adalah ranting (Pekarting = Pembinaan Kader Ranting, Pekarancab = Pembinaan Kader Anak Cabang, Pekercab = Pembinaan Kader Cabang, Perkarda = Pembinaan Kader Daerah, Pekapus = Pembinaan Kader Pusat).

4. Partai harus membuat wadah koordinasi yang kuat baik daerah maupun pusat untuk merekam, mendiskusikan dan mencari solusinya terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, baik isu perpolitikan maupun isu pembangunan yang sedang berjalan. Wadah ini harus melibatkan para tokoh masyarakat, agama, dan para akademis.
5. Untuk menjadi organisasi sosial yang kuat, perlu ada gerakan sosial yang menarik empati masyarakat.

Sasaran dan Pokok-Pokok Program

Pencapaian tujuan Partai Demokrat dilakukan melalui pelaksanaan program umum secara bersungguh-sungguh dengan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditentukan, baik sasaran kedalam maupun sasaran keluar.

Sasaran ke dalam adalah :

1. Memantapkan Partai Demokrat sebagai organisasi kekuatan sosial politik dalam mengembangkan kepercayaan rakyat dalam memikul dan melaksanakan tugas pembaruan dan pembangunan bagi kepentingan rakyat.
2. Mantapnya Partai Demokrat sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang semakin bertumbuh, mengakar, berkualitas, mandiri dan demokratis sehingga lebih tanggap dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan pemantapan perwujudan kehidupan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien serta dinamis menuju Indonesia yang demokratis, sejahtera, maju dan modern dalam suasana aman, dan penuh kedamaian lahir dan batin.
3. Meningkatnya kemampuan dan peranan pengurus dan anggota di semua tingkatan organisasi Partai Demokrat melalui program pelatihan kepemimpinan dan wawasan nusantara bagi kader-kader Partai Demokrat.

4. Meningkatnya peranan semua perangkat organisasi di semua tingkatan
5. Terwujudnya kader Partai Demokrat yang berkualitas, beriman, tidak tercemar, bermoral baik dan memiliki militansi yang tinggi.

Sasaran sebagaimana dimaksud di atas diupayakan untuk dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan terencana, terarah, terkoordinir dan terus menerus yang dapat dirangkum dalam :

1. Konsolidasi
2. Pembangunan nasional
3. Pemilu tahun 2009.

Pokok-pokok program Partai Demokrat untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah meliputi konsolidasi pembangunan nasional dan pemilu tahun 2009.

Konsolidasi :

1. Konsolidasi partai adalah segala usaha dan kegiatan yang terencana, terarah dan terpadu yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, untuk memperkuat apa yang telah dicapai dan mempersiapkan diri dalam rangka usaha mencapai tujuan bersama.
2. Memperkokoh kesetiaan Partai Demokrat kepada ideologi Pancasila. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang demokratis, meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, menjamin hak azasi manusia, dan terwujudnya masyarakat yang aman, adil dan sejahtera.
3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ideologi, paham dan pola pikir yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila.
4. Konsolidasi organisasi meliputi kegiatan-kegiatan di bidang keanggotaan, kaderisasi, kelembagaan, penggalian dan pendayagunaan dana, hubungan dengan organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi serta penerangan, penerbitan dan media massa.

4.2 Sistem Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai

Partai Demokrat adalah partai yang merupakan golongan partai papan atas dan sekaligus pemenang pemilu 2009, dengan perolehan suara lebih dari 20%. Kemenangan Partai Demokrat suatu hal yang fenomenal karena sebelumnya Partai yang digagas oleh Susilo Bambang Yudoyono ini merupakan partai kecil dan lahir pasca reformasi. Dalam usia yang masih belia, Partai Demokrat mampu menyingkirkan lawan-lawan politiknya dalam dunia perpolitikan.

Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dengan perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Bersama PKS, partai ini menjadi *the rising star* pada pemilu kedua di Era Reformasi itu. Popularitas partai ini terutama berada di kota-kota besar, dan di wilayah eks-Karesidenan Madiun, tempat Yudoyono berasal. Dari hasil Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 148 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%). Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat⁶.

Tentunya hal ini menarik bagi siapapun yang mencermati dunia perpolitikan di Indonesia yang mempunyai karakteristik khusus dibanding negara lainnya. Berdasarkan ini pula penulis mengkaji sistem rekrutmen dan kaderisasi Partai Demokrat.

4.2.1 Rekrutmen

Rekrutmen adalah sebuah proses awal yang dilakukan oleh partai politik untuk memperoleh anggota dan kader partai yang potensial. Rekrutmen mempunyai fungsi strategis, karena hasil rekrutmen yaitu anggota atau calon kader merupakan modal awal bagi partai untuk mempertahankan eksistensinya di dalam dunia perpolitikan. Anggota atau calon kader yang

⁶ www.wikipedia.com

terekrut akan dikader agar menjadi agen-agen politik dari partai yang bersangkutan dalam menyebarluaskan platform dan program partai kepada masyarakat.

Dalam konteks kepemimpinan rekrutmen menjadi suatu hal yang sangat penting bagi partai untuk menyediakan kandidat yang akan dicalonkan dalam pemilihan jabatan-jabatan publik. Melalui persaingan dalam pemilu, partai dapat memperoleh akses kekuasaan untuk mewujudkan cita-cita yang dimilikinya. Terlebih lagi, hampir di seluruh negara demokratis saat ini, partai merupakan institusi utama yang mempunyai legitimasi dalam pengisian jabatan-jabatan publik⁷. Salah satu contoh bukti dalam UUD 1945 Pasal 6A Ayat 2 menyatakan: "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*" Sedangkan Pasal 18 Ayat 4 Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*" Dalam konsiderans huruf di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa *partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.*

Rekrutmen Anggota Partai Demokrat

Keberhasilan proses kaderisasi sangat dipengaruhi proses rekrutmen. Produk rekrutmen merupakan calon anggota dan kader dengan potensi serta kualifikasi yang sangat beragam sesuai dengan kriteria masing-masing partai. Anggota merupakan aset partai yang sangat berharga yang harus dijaga, karena selain dapat diproyeksikan untuk regenerasi kepemimpinan kedepannya, anggota juga berfungsi sebagai agen sosialisasi politik kepada masyarakat. Anggota menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai yang dianut oleh partai kepada masyarakat dan sekaligus menjadi pemasar politik dari partai politik yang bersangkutan.

⁷ Puskapol UI, "Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia" (Depok : Puskapol FISIP UI, 2008). hl 47

Sejak Partai Demokrat berdiri rekrutmen anggota yang dilakukan sangat terbuka, belum memiliki pola rekrutmen partai yang baku. Anggota yang tergabung dalam Partai Demokrat merupakan kader yang berasal dari berbagai parpol yang ada seperti GOLKAR, PDIP dan beberapa dari partai kecil. Siapapun yang tertarik dengan isu perubahan yang ditawarkan oleh Partai Demokrat, maka boleh bergabung. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ahmad Mubarak;

“Demokrat itu partai baru, jadi ketika rekrutmen utama bagi orang-orang yang tertarik dengan isu perubahan. Seperti Obama menawarkan perubahan, demokrat juga begitu menawarkan isu perubahan. Dan ketika itu tahun 2001-2003 memang masyarakat sedang gelisah karena tidak jelas masa depan negara kayak apa. Pada saat itu presidennya Megawati. Habis Gusdur kemudian Megawati bingung mau kemana neh. Lalu Demokrat dengan pak SBY tampil menawarkan perubahan. Jadi orang rindu perubahan, perubahan seperti apa? Sesungguhnya orang gak begitu faham. Tapi dengan melakukan perubahan pasti yang namanya perubahan itu ke arah yang lebih baik. Daya tarik ini disempurnakan dengan sosok pak SBY, sosok gagah, jendral, kalem juga punya magnet di kalangan ibu-ibu, kedua kaum intelektual. Pendiri demokrat yang 9 orang itu 6 profesor, termasuk saya, Prof. Subur, Prof Rompa, Prof. Ramli, Prof. Saranggih. Oleh karena itu citranya partai ini partai intelektual. Karena partai baru, kadernya berasal dari berbagai partai yang ada, dari PDIP, Partai Golkar dari semua partai ada.”⁸

Pola rekrutmen seperti ini bertujuan untuk mengumpulkan anggota-anggota yang berpotensi dan mampu mendongkrak suara dalam pemilihan umum (PEMILU). Biasanya yang menjadi target rekrutmen utama adalah tokoh, pejabat atau kalangan entertainer. Karena diyakini orang-orang tersebut akan memberikan daya tarik sendiri bagi para pemilih dalam PEMILU. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BEM Seluruh Indonesia, Wahyu;

“..kalau melihat demokrat kader-kadernya bukan hasil kaderisasi tapi memang ...kalau kita melihat orang-orang yang dimasukin ke demokrat ngambil dari orang-orang yang potensial gitu deh, itu

⁸ wawancara dengan Prof. Ahmad Mubarak. Selaku Wakil Ketua Umum Partai Demokrat periode 2004-2009, sekaligus sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat.

*bukan sistem kaderisasi tapi lebih ke rekrutmen yang sifatnya cari orang-orang yang apa ya, kira-kira dapat membesarkan partai lah”.*⁹

Menurut Wahyu bahwa rekrutmen seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat bukan rekrutmen yang bersifat berkesinambungan dengan proses kaderisasi. Tetapi lebih kepada bagaimana partai memperoleh anggota-anggota yang sudah jadi, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama partai sudah memperoleh orang-orang yang dapat diandalkan untuk mengisi posisi-posisi penting baik dalam partai ataupun untuk jabatan publik. Ini bukan tujuan jangka panjang, melainkan tujuan bagaimana partai dapat memenangkan PEMILU, penulis masih belum melihat rekrutmen ini sebagai usaha untuk memperoleh kader pemimpin di masa yang akan datang.

Rekrutmen seperti di atas sudah mengarah ke marketing politik, dalam artian rekrutmen yang dilakukan partai bertujuan agar partai mempunyai elektabilitas yang tinggi de PEMILU karena kader-kader yang ditampilkan adalah orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman di partai lain atau sudah mempunyai massa seperti Public Figur ataupun pejabat. Partai Demokrat sangat faham bagaimana karakteristik mayoritas pemilih di Indonesia. Sebagian besar pemilih di Indonesia tidak terlalu memperhatikan program partai, tapi lebih melihat kepada figuritas, sehingga semakin banyak sosok terkenal dalam partai maka semakin banyak masyarakat yang memilih anggota partainya. Hal ini jugalah yang menyebabkan Partai Demokrat mengangkat sosok SBY sebagai daya tarik utama dalam rekrutmen ataupun dalam strategi pemenangan PEMILU. Sebagai mana yang disampaikan oleh Ahmad Mubarak,

*“Daya tarik ini disempurnakan dengan sosok pak SBY, sosok gagah, jendral, kalem juga punya magnet di kalangan ibu-ibu, kedua kaum intelektual”*¹⁰

Partai Demokrat dalam rekrutmen menggunakan citra SBY sebagai daya tarik awal. Setelah orang tertarik selanjutnya partai melakukan pendekatan dan penyampaian gagasan-gagasan kepartaian secara persuasif.

⁹ Wawancara dengan Wahyu. Selaku Ketua BEM seluruh Indonesia periode 2008-2009.

¹⁰ wawancara dengan Prof. Ahmad Mubarak. Selaku Wakil Ketua Umum Partai Demokrat periode 2004-2009, sekaligus sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat

Dengan tujuan agar masuk sebanyak-banyaknya ke Partai Demokrat. Bagi siapapun yang tertarik dengan Partai Demokrat maka dipersilakan untuk masuk menjadi anggota Partai. Hal ini juga berlaku di tingkatan yang lebih bawah, seperti DPW, DPD dan DPC. Rekrutmen masih bersifat general, belum ada pemisahan secara khusus sarana yang digunakan dan siapa yang akan menjadi sasaran rekrutmen. Misalnya sarana yang digunakan untuk merekrut pemuda sama dengan sarana yang digunakan untuk merekrut golongan tua. Organisasi *underbouw* belum efektif merekrut kader muda yang potensial. Sebagaimana diungkapkan oleh Wahyu;

“..barisan pemuda demokrat. baru kemaren sempet ada di beberapa daerah tapi belum terlalu masif. waktu itu pernah dikenalkan di kalimantan sempet mendengar tetapi belum secara masif sampai struktur DPW DPD”.

Kegiatan rekrutmen secara formal di bawah Departemen Sumber Daya Manusia. Sejauh ini Partai Demokrat belum menargetkan berapa jumlah anggota dan kader yang harus terekrut.

Dalam hal ini Partai Demokrat menjalankan fungsi rekrutmen untuk memperbanyak anggota, agar terjaminnya kontinuitas partai sekaligus untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Miriam Budiarjo (2008), bahwa partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Rekrutmen Politik juga menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

Berdasarkan teori rekrutmen Miriam Budiarjo, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam rekrutmen. *Pertama*, rekrutmen berorientasi pada kuantitas. *Kedua*, metode rekrutmen yang tepat untuk menarik anggota. *Ketiga*, rekrutmen bertujuan untuk menjamin kelestarian partai. *Keempat*, berfungsi untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Dua poin pertama merupakan panduan rekrutmen anggota

sedangkan dua poin terakhir adalah panduan rekrutmen kader dan pemimpin partai.

Dari paparan sistem rekrutmen anggota yang dilakukan oleh partai Demokrat dapat ditarik benang merahnya, yaitu orientasi rekrutmen terbatas kepada kuantitas, masih bersifat jangka pendek untuk kemenangan PEMILU, bukan untuk tujuan kelestarian partai dan menjaring calon pemimpin di masa yang akan datang.

Selain itu target dari rekrutmen juga tidak terukur. Keterukuran target sangat penting agar strategi rekrutmen yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien. Dengan adanya target yang terukur kerja tim akan lebih terarah. Memudahkan dalam mengevaluasi kinerja tim, karena indikator capaian keberhasilan jelas, sehingga tim akan belajar dari pengalaman.

Selain target yang belum terukur, kelemahan pada sistem rekrutmen anggota yang ada di Partai Demokrat yaitu Manajemen Data Anggota. Partai Demokrat belum mempunyai data yang akurat dan teruji mengenai jumlah anggota. Partai hanya mempunyai data pengurus. Data keanggotaan ini sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pengembangan sumberdaya kader. Dari data anggota pengurus partai bisa memetakan anggota yang ada untuk keperluan masa depan partai. Setiap anggota pasti memiliki potensi yang berbeda dan semuanya dapat diberdayakan untuk peningkatan kinerja partai. Suatu hal yang tidak boleh terlupakan bagi organisasi seperti partai adalah produk yang mereka tawarkan kepada konstituen adalah seorang kader partai. Baik buruknya partai sangat tergantung pada performance kadernya. Hal ini menunjukkan bahwa sumberdaya utama dalam sebuah partai adalah manusianya, sehingga keberhasilan sebuah partai sangat ditentukan oleh sejauh mana partai serius dalam mengelola anggotanya.

Database anggota adalah input awal dalam pengelolaan anggota. Selanjutnya database akan menjadi acuan dalam menentukan program, kebijakan partai dan hal-hal yang lain termasuk yang bersifat strategis. Misalnya, sebuah partai akan melakukan program peningkatan kapasitas kader muda potensial dalam partai, untuk kebutuhan pemimpin di masa yang akan datang. Jika partai tidak mempunyai database anggota yang akurat dan

teruji keabsahannya, tentunya akan kesulitan menentukan peserta yang akan diikuti atau diundang dalam program tersebut dan bisa jadi materi yang diberikan dalam program tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota. Dengan demikian partai dapat menentukan rencana pengembangan kader kedepan melalui kaderisasi dan sebagainya menggunakan data anggota yang akurat dan teruji. Keteraturan dalam pengelolaan data anggota merupakan suatu keniscayaan bagi organisasi modern.

Dalam hal strategi rekrutmen, Partai Demokrat dapat mengidentifikasi kondisi masyarakat dan mampu mengelaborasi dengan kelebihan atau kekuatan partai. Untuk karakteristik masyarakat seperti di Indonesia mayoritas masyarakat adalah pemilih tidak rasional, sehingga kondisi seperti ini dapat *dimatchkan* dengan kelebihan partai yaitu menariknya sosok SBY. Dengan tidak harus bersusah payah banyak orang akan tertarik bergabung dengan Partai Demokrat. Daya tarik figur SBY diakui memang memberikan pengaruh besar kepada keberhasilan rekrutmen anggota di tubuh partai.

Dalam jangka panjang, strategi rekrutmen bersandarkan kepada penokohan sangat rentan. Daya tarik partai sangat identik dengan tokoh, sehingga jika popularitas tokoh menurun akan berimbas kepada menurunnya popularitas partai. Sehingga untuk jangka panjang tim rekrutmen harus menyiapkan strategi yang kreatif, tidak tergantung kepada figur, melainkan penguatan kepada citra dan program-program partai secara keseluruhan yang tercermin dari *culture* kader-kader di dalamnya dan program-program partai.

Rekrutmen Kader dan Pemimpin

Berbeda dengan rekrutmen anggota, dalam rekrutmen kader dan pemimpin ada dua cara yang ditempuh Partai Demokrat. Setiap cara mempunyai tahapannya masing-masing. Metode yang *pertama*, adalah rekrutmen kader dari internal anggota yang sudah terekrut pada proses rekrutmen anggota. Sedangkan metode *kedua*, adalah dengan mencari calon kader dari luar partai, baik dari kalangan akademisi, maupun LSM, artis ataupun dari kalangan politisi Parpol lain. Mereka diundang dan dijelaskan hal-hal yang terkait parpol seperti visi-misi serta program dan apa yang

hal-hal yang terkait parpol seperti visi-misi serta program dan apa yang diinginkan oleh parpol. Jika di antara mereka ada yang tertarik maka bergabung langsung dengan Partai Demokrat. Seperti yang disampaikan Ahmad Mubarak bahwa;

“belum lama ini ada mengundang toko-tokoh intelektual, tokoh muda, diundang ke Cikeas diberi ceramah tentang partai demokrat dan masa depan yang diinginkan. Kan kaum intelektual kurang tertarik pada partai politik, kan arah semua partai kotor. Partai kita ini partai Demokrat ini juga rasional sehingga kaum intelektual juga masuk”¹¹.

Setelah seseorang sudah masuk dalam keanggotaan Partai Demokrat, akan melewati serangkaian pendidikan dan pelatihan yang singkat. Selama dua pekan berturut-turut, dengan berbagai materi Kepartaian dan Motivasi. Periode sebelumnya kegiatan tersebut dilakukan menjelang Pemilu Legislatif.

Metode rekrutmen yang pertama belum begitu berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kader-kader pemimpin yang menduduki posisi penting dalam partai ataupun yang duduk dalam posisi publik. Penulis masih melihat banyaknya pemimpin yang merupakan kader-kader instan dari luar partai. Misalnya saja anggota legislatif masih didominasi publik figur yang bukan hasil kaderisasi partai demokrat. Artinya fenomena tersebut menjelaskan bahwa rekrutmen pemimpin dari anggota partai masih belum berjalan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa rekrutmen pemimpin dari kalangan internal partai tidak berjalan. *Pertama*, karena lemahnya sistem kaderisasi partai sehingga tidak mampu menciptakan kader yang handal. Pembahasan mengenai kaderisasi akan dijelaskan pada sub bab Kaderisasi. *Kedua*, ada faksi-faksi tertentu dalam partai yang berkuasa sehingga pengaruhnya cukup besar terhadap kebijakan partai termasuk dalam menentukan pemimpin. Sudah menjadi suatu hal biasa dalam partai terdapat kubu-kubu yang berbeda pandangan satu sama lainnya, sehingga beberapa orang yang memiliki pandangan yang sama akan berkelompok sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip yang mereka anut. Hal inilah yang kemudian anggota menjadi beberapa faksi/kelompok. Hal ini tidak menjadi masalah selama satu

¹¹ wawancara dengan Prof. Ahmad Mubarak. Selaku Wakil Ketua Umum Partai Demokrat periode 2004-2009, sekaligus sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat.

sama lainnya saling menghormati dan memiliki prinsip demokratis. Namun jika toleransi dan sikap demokratis sudah ditinggalkan maka akan menghambat proses demokratisasi dalam sebuah partai. Misalnya, ketika salah satu faksi mendapat kepercayaan menjadi pemimpin terkadang tidak atau kurang memberi kesempatan yang lebih kepada faksi lainnya untuk memegang peranan strategis. Tentunya hal ini menghambat proses rekrutmen pemimpin yang potensial terutama dari faksi lain yang tidak berkuasa.

Ketiga, tidak adanya mekanisme reward dan punishment yang jelas dalam tubuh partai. Sistem *reward* akan mendorong seseorang untuk meningkatkan prestasi. Sedangkan *punishment* mendorong seseorang untuk senantiasa hati-hati dalam bertindak, agar tidak mendapatkan hukuman atas kesalahan yang diperbuat. Jika sistem *Reward* dan *Punishment* ini berjalan dengan seimbang akan mendorong kader partai meningkatkan segala potensi yang ada untuk menjadi kader terbaik dan senantiasa mawas diri agar tidak melakukan hal-hal yang dianggap tercela oleh partai. Apabila hal ini sudah menjadi budaya partai, maka akan tercipta kader-kader dengan kualitas yang jauh lebih baik. Namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan ketegasan dari partai, tidak boleh pandang bulu.

Partai Demokrat belum memiliki mekanisme *reward* dan *punishment*. Hal ini berdasarkan pengakuan Ahmad Mubarak dan Wahyu dalam wawancara singkat mengenai sistem rekrutmen Partai Demokrat. Wahyu mengatakan;

"Kalau di Demokrat, Sistem punishment dan reward itu kan dalam organisasi modern menjadi suatu hal untuk meningkatkan prestasi. Berbicara modern adalah semuanya adalah rangsangan, prestasi itu didongkrak dengan salah satu caranya dengan adanya reward bagi yang berprestasi, punishment kemudian jika dia tidak berprestasi. Dalam hal ini, saya belum melihat, jujur belum punya referensi mengenai reward dan punishment yang diterapkan di Demokrat. Misalnya ada kader yang berprestasi diapakan dan kemudian dalam hal penanganan yang bermasalahpun belum melihat. karena belum ada ketegasan, misalnya ada indikasi kader-kadernya melakukan suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya melanggar hukum, dengan tegas Demokrat mengambil sikap atau segala macam belum terlalu nyaring disuarakan. Waktu itu kasus korupsi yang ketangkep KPK yang salah satunya adalah kader Demokrat, masih

sangat kabur lah kabarnya seperti diapakan atau sikap seperti itu belum tegas, termasuk yang rward juga belum melihat contoh di demokrat”.

Sistem *Reward dan Punishment* sangat penting untuk dijalankan, agar gairah kader meningkat dan banyak kalangan dari luar pun tertarik untuk bergabung dengan partai. Masyarakat pun akan melihat dengan positif dan semakin percaya dengan kinerja partai.

Sesungguhnya dalam tataran praktis yang sering menimbulkan banyak masalah adalah pada sistem rekrutmen cara kedua. *Pertama*, Rekrutmen seperti ini terjebak dengan rekrutmen politik yang bersifat instan, yaitu rekrutmen yang berorientasi jangka pendek kemenangan pemilu semata. Indikatornya adalah mayoritas anggota yang direkrut dan ditempatkan posisi yang strategis adalah tokoh-tokoh non partai atau baru masuk partai yang mempunyai popularitas dan tingkat elektabilitas yang tinggi. Untuk maju dalam pemilihan umum, partai kurang memperhatikan aspek kinerja dari bakal calon, masih berorientasi jangka pendek. Selama ini proses seleksi kandidat sering mengesampingkan pertimbangan terhadap kapasitas, integritas, pengalaman, dan penugasan bakal calon. Pada kenyataannya hal ini berdampak buruk bagi partai. Dalam hal ini fungsi rekrutmen untuk menjamin kelestarian partai dan menjaring serta melatih calon-calon pemimpin tidak berjalan

Dalam perekrutan metode kedua ini Partai Demokrat merekrut kalangan tertentu, khususnya *public figur*, seperti entertainer, pengusaha, pejabat atau mantan pejabat, untuk menempati posisi struktur partai ataupun sebagai anggota legislatif tanpa prosedur yang jelas dan kualifikasi yang sesuai. Dalam sebuah *Focus Group Discussion* tentang rekrutmen dan kaderisasi yang diselenggarakan PUSKAPOL UI salah satu peserta menyampaikan bahwa kecenderungan partai-partai di Indonesia melakukan rekrutmen kader pemimpin secara instan, orientasi pada kemenangan pemilu. Rekrutmen seperti ini mempunyai banyak kelemahan dan bahkan bisa merugikan partai itu sendiri. *Pertama*, kader yang terekrut dari rekrutmen seperti ini belum teruji tingkat loyalitasnya, karena keterlibatan di partai masih belum lama. Kader belum bisa menjiwai nilai-nilai yang dianut partai,

karena interaksi dengan partai tidak intens sebelumnya. Akibatnya banyak kader yang berperilaku jauh dari nilai-nilai luhur partai. Partai Demokrat mengusung nilai-nilai religius dan sopan santun dalam berpolitik. Namun pada kenyataannya nilai-nilai itu dilanggar oleh kader yang mempunyai peran/posisi penting di dalam partai dan dia merupakan kader dari hasil rekrutmen metode kedua ini.

Kedua, jika metode rekrutmen seperti ini mendapat porsi yang besar, maka dapat menimbulkan kecemburuan pada kader lainnya yang notabene merupakan kader yang sudah lama mengabdikan kepada partai. Jika hal ini berlangsung terus menerus dapat menimbulkan perpecahan partai. Partai selayaknya mengapresiasi kader-kader yang merupakan kader berpotensi dan sudah mengabdikan sejak lama kepada partai.

Ketiga, jika produk rekrutmen seperti ini langsung menempati posisi strategis seperti anggota legislatif, tentunya ini sangat berisiko. Anggota legislatif dari partai merupakan representasi dari partai tersebut. Jika kader yang bersangkutan mempunyai *track record* yang baik sebelumnya mungkin tidak terlalu menjadi masalah, namun sebaliknya jika dia membawa kebiasaan-kebiasaan yang lama dan buruk ke dalam tubuh partai akan memberikan citra buruk pada partai. Hal ini pun dikeluhkan oleh Ahmad Mubarak sendiri;

“..kendalanya penyakit lama. yaitu perilaku yang dibawa sebelum dia di Demokrat. terutama ketika ada orang baru, itu over acting menyingkirkan kader-kader yang lama. Itu terjadi juga di semua partai. Anda juga tahu kan ada kader kita yang terlibat kasus”

Penyebab utama masalah di atas dikarenakan partai belum memiliki prosedur rekrutmen yang jelas sebagai acuan partai. Selama ini rekrutmen dilakukan dengan kurang perencanaan. Solusi untuk hal tersebut adalah Partai harus menentukan prosedur dan kualifikasi yang jelas dalam perekrutan kader metode kedua yang diketahui dan disepakati oleh seluruh atau mayoritas anggota partai. Selain itu juga mekanisme *reward* dan *punishment* harus jelas dan dijalankan secara konsisten untuk mendorong kader berprestasi.

Berkaitan dengan hal ini Lili Romli, dkk (2008) mengungkapkan bahwa ada beberapa permasalahan yang umumnya kini dialami partai-partai politik di Indonesia saat ini. *Pertama*, partai belum memiliki prosedur rekrutmen yang mapan, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. Persoalan inilah yang melatar belakangi sebagian partai untuk melakukan rekrutmen politik yang bersifat instan, antara lain dengan memasukan kalangan tertentu seperti *public figur*, pejabat atau mantan pejabat, dan kalangan pengusaha sebagai anggota, pengurus, dan bahkan sebagai calon anggota legislatif. Rekrutmen instan semacam ini juga tidak membantu partai dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan kebijakan publik. Beberapa entertainer yang terpilih dari Pemilu 2004 lalu nampak tidak terlihat sepak terjangnya sebagai seorang wakil rakyat. Indikatornya dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan mereka di media. Di sisi lain, rekrutmen semacam ini juga semakin mempersempit jalur masuk bagi kader yang berjuang dari bawah yang secara sederhana dianggap memiliki pengenalan yang lebih dalam terhadap ideologi partai.

Beberapa sarjana Ilmu Politik memang berpendapat bahwa tidak semua kebutuhan sumberdaya manusia dalam partai dapat dipenuhi dari rekrutmen normal. Karena itu parpol dimungkinkan untuk merekrut anggota atau kader dengan kualifikasi tertentu seperti ahli yang tenaganya dibutuhkan untuk pengembangan partai. Walaupun demikian, dalam perekrutannya tetap harus melalui proses yang ketat dengan kriteria yang jelas, sehingga tidak menjadi persoalan baru di dalam partai (Lili Romli, 2008).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam persaingan politik yang semakin ketat, Partai Demokrat belum memiliki sistem rekrutmen dengan orientasi, kriteria, administrasi, serta metode yang jelas. Partai masih terlalu terfokus pada kebutuhan jangka pendek, masih kurang memberi perhatian kepada kebutuhan partai jangka panjang terutama pengembangan anggota dan kader. Karena salah satu fungsi dasar partai menyeleksi kader untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas. Kondisi seperti di atas harus segera diperbaiki, agar tidak terjadi dampak yang lebih buruk lagi.

4.2.2 Kaderisasi

Bagi partai politik rekrutmen hanya merupakan gerbang masuk anggota yang ingin bergabung ke partainya. Jika anggota ingin terlibat lebih jauh lagi, berjuang, menyebarkan nilai-nilai yang dianut partai maka selanjutnya dia harus melewati proses penempatan. Setelah proses rekrutmen dilakukan, selanjutnya partai harus melakukan kaderisasi atau pendidikan politik bagi anggotanya, sehingga anggota partai tersebut dapat memahami tujuan-tujuan partai, mampu menginternalisasikan nilai-nilai yang dianut partai, dan mempunyai kualifikasi yang memadai untuk memperjuangkannya.

Definisi kaderisasi menurut Hadari (1993) adalah proses melatih dan mengembangkan diri dalam memimpin melalui proses belajar dan pengalaman langsung. Kemudian berdasarkan pengalamannya perlu memilih seorang/beberapa orang untuk diberi kesempatan memperoleh pengalaman yang intensif dalam memimpin. Kesempatan itu antara lain dengan memberikan jabatan tertentu, dan mengikuti pelatihan. Rangkaian kegiatan tersebut dinamakan proses kaderisasi, yang berisi upaya-upaya mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin.

Setiap pemimpin berkewajiban membantu orang-orang yang dipimpinya, mengembangkan kemampuan masing-masing, dalam menjalankan kepemimpinan. Pemimpin berkewajiban memberikan kesempatan anggota organisasinya untuk memperoleh pengalaman memimpin.

Dalam dunia politik kaderisasi merupakan salah satu fungsi partai yaitu fungsi sosialisasi politik. Seperti yang diungkapkan oleh Miriam Budiarmo (2008), bahwa sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai suatu proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan "budaya politik" yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian

sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa. Pelaksanaan fungsi sosialisasi politik dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu kursus kader, penataran, ceramah-ceramah, penerangan, media masa dan sebagainya (Budiardjo, 2008).

Seorang ahli sosiologi politik, M.Rush (1992) mendefinisikan bahwa sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenal sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.

Dari definisi kaderisasi dan teori sosialisasi politik di atas, diperoleh rumusan bahwa kaderisasi partai politik merupakan serangkaian proses pelatihan, pengembangan diri baik secara formal maupun informal dan transfer budaya politik berupa norma-norma, nilai-nilai, sehingga seseorang yang melaluinya memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

Berdasarkan rumusan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses kaderisasi partai politik. *Pertama*, kaderisasi merupakan transfer nilai-nilai, norma-norma yang dianut parpol. *Kedua*, kaderisasi harus berorientasi pada perubahan sikap dan orientasi kader sesuai yang diharapkan parpol. *Ketiga*, Bentuk kegiatan dari kaderisasi berupa pelatihan, pengembangan diri dan praktik langsung.

Secara *person to person* dan secara tidak langsung Partai Demokrat telah melakukan kaderisasi sebelum Pemilu 2009. Melalui pertemuan-pertemuan kader, kongres dan momen lainnya Partai Demokrat melakukan komunikasi dan sosialisasi politik kepada kadernya. Kader-kader senior seperti pendiri partai dan tokoh penting partai melakukan sosialisasi gagasan dan mentransfer nilai-nilai yang dianut Partai Demokrat. Perubahan sikap yang diharapkan oleh Partai Demokrat adalah sikap politik cerdas, santun dan demokratis. Menurut Partai Demokrat Secara lebih intensif program kaderisasi baru dilakukan menjelang Pemilu 2009. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah seorang pendiri partai yaitu Ahmad Mubarak;

"..Kemudian pelatihan kader yang sesungguhnya baru terakhir dilakukan ya ini pada menjelang pemilu 2009. Sebelumnya

pertemuan-pertemuan. Pertemuan kader, tapi lebih membangun komunikasi dan sosialisasi belum pelatihan kader. Sosialisasi gagasan, yang ditawarkan selalu partai politik cerdas, santun dan demokratis”.

Kaderisasi yang dilakukan menjelang pemilu 2009 untuk menumbuhkan semangat para kader agar terus bergerak dalam memenangkan pemilu 2009. Pelatihan kader dilakukan selama dua minggu berturut-turut setiap angkatan. Materi pelatihan kader adalah tentang sejarah, anggaran dasar, visi, market politik, dan ideologi partai. Menurut Partai Demokrat kaderisasi seperti ini sangat efektif dengan indikator keberhasilan bahwa kader-kader yang ikut pelatihan menjadi motor penggerak dalam memobilisasi masyarakat dalam kemenangan Pemilu 2009. Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Mubarak sebagai berikut,

“...yang betul2 kaderisasi menjelang pemilu 2009, yaitu ketika Demokrat mencanangkan target 15 %, persyaratan pencalonan presiden tahun 2004 kan cuma 2,5 %, partai yang memperoleh 2,5% dapat mencalonkan presiden sendiri. Undang-undang tersebut akan diubah, Demokrat mengusulkan 15 % maka target 15%. Tiba-tiba PDIP dan Golkar berpikir lain mereka memasang angka 30 %. Kemudian turun akhirnya menjadi 20%. Setelah itu sadar kalau Demokrat gak bisa 20% maka Demokrat tidak bisa mencalonkan presiden sendiri. Kalau koalisi dengan orang, akan akan tawar menawar. Maka Demokrat menaikkan targetnya menjadi 20%. Tetapi kemudian yang dilakukan kaderisasi untuk memompa semangat itu kita lakukan adalah per DPC diundang 4 orang, ketua sekretaris bendahara dan ketua bidang perempuan. Betul-betul pelatihan kader, dilakukan di puncak satu angkatan 15 hari. Oleh karena itu untuk se-Indonesia 8 angkatan, bayangkan melaksanakan acara 8 kali 2 minggu. 3 bulan berturut, diakhiri dengan ketemu pak SBY di Cikeas. Karena 2 minggu maka materinya lengkap, tentang sejarah, anggaran dasar, visi, market politik, ideology termasuk outbond, maka setiap angkatan ketahuan siapa yang paling pinter. bagaimana berorganisasi. Tampaknya kaderisasi seperti ini efektif. bergeraklah di daerah sehingga ketika pemilu 2009 luar biasa dengan politik market yang pas kita dapet 20%..”

Menurut teori sosialisasi politik Partai Demokrat telah berupaya melakukan proses kaderisasi politik. Namun dalam hal ini Partai Demokrat mengalami disorientasi. Dari pernyataan pertama Ahmad Mubarak mengatakan bahwa yang diharapkan dari kaderisasi politik ini adalah

perubahan sikap politik yang cerdas, santun dan demokratis pada setiap kadernya. Tapi dalam prakteknya kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat hanya dilakukan menjelang pemilu dan cenderung berorientasi pada kemenangan partai semata. Hal tersebut juga dapat dilihat dari materi yang ditekankan dalam pelatihan kader, yaitu lebih lebih berorientasi pada pemilu. Materi-materi-materi yang bersifat peningkatan-peningkatan skill kader dalam memimpin, mengelola, komunikasi politik tidak terlalu menjadi perhatian.

Proses kaderisasi adalah proses pendidikan politik yang panjang dan berkesinambungan. Dalam proses itu terjadi transfer nilai-nilai, norma-norma dan budaya yang secara perlahan dan terus menerus dari pihak satu kepada pihak yang lainnya. Proses transfer ini dinamakan internalisasi nilai-nilai, norma-norma dan budaya ke dalam diri penerima, sehingga terjadi sebuah perubahan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai, norma dan budaya yang diterima. Contoh sederhananya begini, seorang guru akan mengubah perilaku muridnya dari seorang yang malas belajar menjadi seorang yang giat belajar. Dalam proses perubahan perilaku ini terlebih dahulu terjadi transfer nilai-nilai, norma-norma dan budaya giat belajar dari seorang guru ke siswanya dengan berbagai cara dan media, yaitu lewat ucapan, tulisan dan contoh perilaku. Tentunya tidak serta merta siswa ini langsung menerima apa yang disampaikan oleh gurunya serta terjadi perubahan sikap, di sini terjadi tarik-menarik antara nilai-nilai yang dianut sebelumnya dengan nilai yang akan ditanamkan dalam waktu yang relatif lama. Ada dua kemungkinan, siswa ini berubah menjadi giat belajar atau tetap dengan kondisi semula. Jika hal-hal yang disampaikan oleh gurunya terinternalisasi dengan baik maka akan terjadi perubahan sikap. Namun sebaliknya, jika tidak berhasil tidak akan terjadi perubahan sikap. Kasus ini identik dengan proses kaderisasi, dimana seorang anggota partai akan menerima input nilai-nilai, norma, dan budaya dari partainya seperti ideologi, budaya politik dan lain sebagainya dari para kader senior atau pendahulunya. Proses ini membutuhkan waktu yang relatif lama, tidak cukup hanya dengan waktu satu atau dua minggu. Selain itu kegiatan yang bersifat kaderisasi harus intens, rutin dan berkesinambungan.

Sebaiknya juga dilakukan bukan hanya dalam acara-acara formal dan kolosal saja proses kaderisasi dilakukan.

Sebagaimana disebutkan oleh Lili Romli (2008) bahwa untuk mendukung tercapainya pembinaan kader, dalam jangka pendek, pada tahap awal partai menyusun target baru jumlah kegiatan kaderisasi di masing-masing tingkat kepengurusan. Ini dilakukan tidak hanya bertumpu pada kegiatan-kegiatan konvensional sebagaimana selama ini biasanya dilakukan partai, melainkan juga pembinaan yang lebih rutin dan berkelanjutan. Pelatihan kader yang bersifat kolosal dan bersifat formal tidak menjamin terinternalisasinya nilai-nilai partai oleh kader karena memang dilakukan temporer dan cenderung tidak berkelanjutan. Dalam teori perubahan sikap tidak mudah mengubah perilaku seseorang dari perilaku sebelumnya menjadi perilaku yang diharapkan hanya dengan pertemuan yang relatif singkat.

Dalam wawancara singkat dengan Wahyu Ketua BEM se-Indonesia mengatakan. Bahwa kaderisasi di partai Demokrat belum tersistem dengan baik,

“...belum ada, tapi mungkin proses ada, misalkan yang biasa kita dapetin seperti ini saya sering mendapati para pemimpin itu mereka punya faksi-faksi, misalkan Anas dengan siapa itu biasanya punya turunan-turunannya. kalau kita melihat itu mungkin tetapi dibalik itu sesuatu yang belum kita ketahui adalah misalkan untuk secara masif ya, siapa mengkader siapa dalam artian tidak tersistem tapi disitu tidak ada sistem..”

Kelemahan kedua, sistem kaderisasi Partai Demokrat pada sistem manajemen data. Partai belum mempunyai database anggota secara akurat dan terpercaya. Padahal untuk pengembangan dan penempatan kader sangat dibutuhkan data kader yang akurat dan rinci terutama untuk pemetaan kader. Pemetaan kader berfungsi agar program kaderisasi yang dilakukan oleh partai sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Sehingga menghemat dana yang dialokasikan partai untuk program kaderisasi. Untuk jangka panjang data anggota dapat digunakan untuk memetakan potensi kader pada jabatan-jabatan publik yang sesuai. Tanpa data anggota yang lengkap partai akan kesulitan dalam memetakan anggotanya serta dalam melakukan proses kaderisasinya.

Kelemahan ketiga, dalam sistem kaderisasi Partai Demokrat penjenjangan kader tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari Bab III tentang keanggotaan dan pengurus dalam ADART partai (lampiran 2). Padahal penjenjangan berfungsi untuk membedakan tingkatan kualifikasi kader pada setiap jenjang. Hal ini untuk memudahkan dalam proses pemetaan, perencanaan pengembangan, monitoring, penempatan dan evaluasi proses kaderisasi. Hal ini juga diungkapkan oleh Wahyu sebagai berikut;

“Penjenjangan sebenarnya gambaran kecilnya ya kayak kita sekolah, ya artinya setiap jenjang itu ada hak dan kewajiban yang berbeda, seperti itu. pun dengan keanggotaan, misalkan suatu organisasi atau komunitas melakukan penjenjangan, karena memang kader itu ada yang awal kemudian ada yang sudah mengikuti satu fase atau melewati fase yang lain. Karena mengapa mereka naik jenjang karena mempunyai kafa'ah (kemampuan) tertentu.. nah kalau dari sini pentingnya penjenjangan itu menurut saya adalah melihat atau mengevaluasi terutama dalam posisi partai adalah kapasitas, pemahaman dia tentang partai itu sendiri kemudian yang kedua bagaimana hak dan kewajiban itu dibagi, misalkan Kalau bicara di sini PKS ada kader-kadernya yang kader inti, ada kader muda, kader madya, dan itu kan beda kewajiban, beda hak gitu. setiap fase itu beda. Untuk partai Demokrat saya ga tau penjenjangannya seperti apa, karena tadi melihat sistem Kaderisasi Demokrat, kaderisasinya belum terstruktur, belum secara masif”¹².

Penjenjangan adalah sebuah metode klasifikasi kader berdasarkan kualifikasi tertentu, dimana setiap jenjang menggambarkan kualitas seorang kader berdasarkan kriteria-kriteria yang digunakan oleh partai. Penjenjangan memberikan konsekuensi adanya hak dan kewajiban yang berbeda pada setiap jenjangnya. Penjenjangan memudahkan partai proses kaderisasi, karena setiap jenjang memiliki karakteristik yang berbeda maka program dan materi kaderisasi pun akan berbeda pula, menyesuaikan tingkatan jenjang.

Partai Demokrat belum melakukan sistem penjenjangan layaknya sistem kaderisasi pada organisasi kepartaian yang modern. Hal ini mengakibatkan partai kesulitan dalam memproyeksikan mana saja kader-kader yang potensial untuk menempati jabatan-jabatan tertentu dalam partai ataupun di jabatan publik. Dalam jangka panjang penjenjangan sangat

¹² Wawancara dengan Wahyu. Selaku Ketua BEM seluruh Indonesia periode 2008-2009.

dibutuhkan terlebih bagi partai yang mempunyai kader dan anggota yang banyak. Harus dibuat sistem penjenjangan yang jelas, sehingga dapat dijadikan acuan tim kaderisasi dalam memetakan kader. Dari sistem penjenjangan juga memudahkan tim kaderisasi untuk mengevaluasi, sehingga mekanisme *reward dan punishment* dapat diterapkan dengan lebih mudah dibandingkan dengan sistem kaderisasi tidak berjenjang. Sistem penjenjangan harus didukung oleh Manajemen data yang baik. Permasalahannya Partai Demokrat ini belum memiliki manajemen data yang baik, sehingga sistem penjenjangan sulit diterapkan.

Selain itu, materi atau kurikulum kaderisasi Partai Demokrat masih terbatas pada pemahaman visi-misi partai, ideologi serta hal-hal yang berkaitan dengan kepartaian, belum menyentuh materi-materi yang bersifat peningkatan skill kader yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya bagi kader calon anggota legislatif dilakukan pelatihan kader khusus bagaimana menjadi seorang anggota legislatif yang profesional atau pelatihan kepemimpinan yang intensif bagi para calon pemimpin seperti pelatihan intensif *public speaking*, pelatihan manajemen konflik dan lain sebagainya yang dibuat secara terstruktur, berjenjang dan berkesinambungan. Partai harus menentukan mekanisme evaluasi yang jelas dan konsisten untuk setiap kader pada setiap jenjang. Sistem evaluasi yang jelas sangat membantu sistem *reward dan punishment* diimplementasikan.

Kurikulum yang dibuat juga harus berorientasi kepada kebutuhan di lapangan. Hal ini disebabkan kurikulum harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan dihadapi di lapangan. Manfaat kurikulum yang baik adalah memberikan bekal yang cukup untuk kader dalam melakukan tugasnya. Kader tidak gamang dan bingung dalam melakukan tugasnya, sehingga kader dapat memberikan *performance* yang optimal. Tentunya, *performance* kader yang baik akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada kader atau bahkan partainya meningkat. Kader yang mendapat kepercayaan dari masyarakat memberikan keuntungan kepada partai sebagai agen *marketing* politik dan lebih teknisnya lagi partai dapat menghemat

ongkos politik untuk promosi kader-kader seperti ini, karena masyarakat akan membantu memasarkan.

Permasalahan-permasalahan kaderisasi yang dialami Partai Demokrat ini juga diungkapkan juga oleh Lili Romli (2008) bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi partai politik di Indonesia. *Pertama*, lemahnya kaitan antara kaderisasi dan promosi kader. *Kedua*, partai belum mempunyai standar dan penjenjangan kaderisasi yang kokoh. *Ketiga*, terbatasnya sumberdaya yang dialokasikan partai bagi kegiatan pengkaderan.

Bagi Partai Demokrat belum terlambat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam bidang kaderisasi. Partai harus memulai berbenah diri untuk melakukan perencanaan dan mengimplemetasikan sistem kaderisasi untuk menyiapkan para pemimpin di masa yang akan datang. Karena selama ini Partai Demokrat belum menerapkan sistem kaderisasi, baru menerapkan kaderisasi secara person to person dan bersifat informal. Selama ini Partai Demokrat sangat terbantu oleh figur Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagai daya tarik partai. Seperti yang diungkapkan oleh Wahyu;

“Kalau saya masih melihat ya kalau Demokrat ya SBY, sementara kekuatan figurnya luar biasa terbukti. beberapa penelitian di beberapa daerah2, berapa sih sumbangan partai berapa sih sumbangan figur, persentase dalam kemenangan pemilu pilkada misalnya. ternyata memang lebih besar persentase sumbangan figur, dalam hal ini saya masih melihat figur SBY sangat kuat. Untuk Demokrat, Demokrat ini selain memang pertama mesin partai, sebenarnya kekuatan uatamanya kekuatan figur SBY”.

Jika Partai Demokrat masih menggunakan strategi mengandalkan figur sebagai penarik simpati masyarakat, dalam jangka panjang sangat rentan. Karena, jika figur yang diandalkan kinerjanya menurun atau sudah udzur maka citra partai akan terganggu oleh hal-hal seperti ini. Berbeda dengan partai yang mengandalkan kesolidan kader-kadernya dia akan lebih bisa bertahan atau eksis dalam kancah perpolitikan.

Al hasil walaupun menurut pimpinan Partai ini cara yang efektif dalam kaderisasi tapi sesungguhnya proses seperti ini hanya efektif untuk kemenangan pemilu saja bukan efektif melahirkan pemimpin-pemimpin baru.

Jadi bisa dikatakan proses kaderisasi seperti ini kurang efektif dan tidak berorientasi pada regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang.

Dalam jangka panjang hal ini tidak dapat melahirkan kader-kader yang berkualitas dan tidak menjamin kontinuitas partai. Karena pelatihan kader yang bersifat kolosal dan bersifat formal tidak menjamin terinternalisasinya nilai-nilai partai pada kader. Selain itu juga dikarenakan pelatihan tersebut bersifat temporer dan tidak berkelanjutan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berkaitan dengan rekrutmen anggota dapat disimpulkan bahwa rekrutmen yang dilakukan Partai Demokrat sudah sesuai dengan ADART dan memiliki kriteria yang jelas. Partai Demokrat belum melakukan pengelolaan data anggota dengan baik, sehingga partai tidak memiliki data yang akurat tentang anggota yang akan digunakan untuk pemetaan dan pengembangan kader. Dalam rekrutmen kader pemimpin tidak ada kriteria dan mekanisme yang jelas untuk mengatur rekrutmen kader. Partai Demokrat masih berorientasi jangka pendek, sehingga kader-kader pemimpin yang muncul di posisi strategis seperti anggota legislatif dan kepala daerah masih banyak dari kalangan entertainer, *public figur*, pejabat dan mantan pejabat yang kemampuannya masih dipertanyakan.

Secara Substansi Partai Demokrat sudah berupaya untuk melakukan kaderisasi. Dalam pelaksanaannya sistem kaderisasi di Partai Demokrat masih berorientasi pada jangka pendek yaitu kemenangan pemilu. Belum ada database anggota dan kader dan belum jelasnya sistem penjurangan kader. Kurikulum kaderisasi masih belum berorientasi pada pembekalan dan peningkatan kapasitas kader dalam menjalankan amanahnya baik dalam partai ataupun pemerintahan, sehingga kurikulum harus direvisi dan terus dikembangkan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat meningkatkan skills setiap anggota dan kader.

5.2 Saran

Untuk rekrutmen anggota sebaiknya partai menentukan pola rekrutmen yang dapat dijadikan acuan dalam proses rekrutmen anggota, sehingga dengan pola tersebut dapat diperoleh anggota-anggota yang kualitas baik dan kuantitasnya sesuai target partai. Kedua, sebaiknya manajemen data anggota dan kader dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan tim kaderisasi dalam pemetaan anggota dan kader termasuk untuk mengisi jabatan-jabatan publik.

Sebaiknya Sistem kaderisasi senantiasa berorientasi kepada tujuan jangka panjang, yaitu menghasilkan kader-kader yang berkualitas yang dapat mengisi pos-pos yang ada baik dalam internal partai sendiri ataupun pada jabatan publik serta dapat menjaga kelestarian partai. Sistem penjenjangan sangat membantu dalam proses kaderisasi terutama kegiatan pemetaan kader, kurikulum, monitoring, dan penugasan/penempatan.

Ada beberapa strategi penguatan kaderisasi yang perlu dikembangkan oleh partai politik ke depan termasuk Partai Demokrat. *Pertama*, partai meningkatkan frekuensi dan kedalaman kegiatan kaderisasi. Hal ini bertujuan agar materi-materi yang disampaikan dapat terinternalisasi pada setiap kader, maka frekuensi dari program pelatihan atau pendidikan politik ditingkatkan dan berkesinambungan, sehingga terjadi perubahan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai partai secara perlahan-lahan menjadi lebih baik, dalam hal ini sikap politik cerdas, santun dan demokratis.

Kedua, partai melakukan pembaharuan kurikulum dan materi kaderisasi secara berkelanjutan. Materi kaderisasi yang ideal adalah materi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan politik dan menjadi bekal bagi kader dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan dari partai.

Ketiga, menjadikan kaderisasi sebagai program prioritas partai. Dengan menjadi program prioritas partai harapannya partai dapat melahirkan kader-kader pemimpin yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amal, Ichlasul. (1996). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. PT. Tiara Wacana, Yogya.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi terbaru). Jakarta: Gramedia Putaka Utama.
- Flippo, Edwin B. (1984). *Personel Management* (6th Ed.). New York: McGraw Hill.
- Gibson, I., & Donnely.(1987). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*.(Edisi kelima). Jakarta: Erlangga.
- Hague, Rod. (1998). *Comparative Government and Politics*.London: Macmillan Press.
- Heywood, Andrew. (1997) .*Politiccs*. London:Macmillan Press.
- Mondy R. Wayne and Robert M. Noe, *Human Resource Management*. 1990. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Janda, Kenneth. (1993). Comparative Political Parties: Research and Theory. In Ada W. Finifter (Ed.). *Political Science: The State of The Dicipline II*. Washington, D.C: American Political Science Association.
- Kadarman, A.M., et.al. (1992). *Pengantar Ilmu Manajemen: buku panduan mahasiswa*. Jakarta: A.A. Bakelma VitgeversB.V.
- Kossen, Stan. (1986). *Aspek Manusiawi dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Likert, Rensis. (1986). *Organisasi Manusia: Nilai dan Manajemen*. (Edisi Baru). Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, Hadari. (1993). *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Neumann, Sigmund.(1963). *Model Political Parties*” dalam Comaparative Parties: A Reader, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter. London: The Free Press of Glencoe.
- Poerwantana, P.K. 1994. *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Puskapol UI. (2008). *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia*.Depok : Puskapol FISIP UI.
- Robins, P.Stephen. (2003). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia.
- Romli, Lili dkk. (2008). *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia*. Depok: Puskapol FISIP UI.

- Roy C. Macridis. (1996). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. (Editor : Ichlasul Amal);
Penerbit : PT. Tiara Wacana Yogya.
- Stoner, James A.F. (1986). *Manajemen*.(Jilid II).(Edisi Kedua). Jakarta: Erlangga.
- Suiopo. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Ware, Alan. (1996). *Political Parties and Political Systems*. New York: Oxford University Press.
- Churchill, Gilbert A. (2005). "*Dasar-Dasar Riset Pemasaran*" (Andriani, dkk, Penerjemah).(Edisi 4).(Jilid I). Jakarta: Erlangga.
- R. Soedijono. (2008). Suplemen Kuliah: "*Metode Riset Bisnis*". Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Yukl, Garry. (1994). *Kepemimpinan dalam organisasi*. (terj. Jusuf udaya). Jakarta: Prehalindo.

WAWANCARA

- Mubarok, Achmad. (2010, Juni). Personal interview.
- Wahyu. (2010, Juli). Personal Interview.

PUBLIKASI ELEKTRONIK

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat

<http://www.demokrat.or.id/>

www.magisterhukum.unila.ac.id/wp.../kuliah-2-data-dan-sumber-data-ppt1.pdf

KARYA NONCETAK

PUSKAPOL UI. (2008). Focus Group Discussion

**Wawancara dengan Prof. Dr. Ahmad Mubarak, Wakil Ketua Umum Partai
Demokrat**

Kira-kira rekrutment di demokrat itu seperti apa ya?

Demokrat itu partai baru, jadi ketika rekrutmen, diutamakan bagi orang-orang yang tertarik dengan isu perubahan. Seperti obama menawarkan perubahan, Partai Demokrat juga begitu, menawarkan isu perubahan. Dan ketika itu tahun 2001-2003 memang masyarakat sedang gelisah karena tidak jelas masa depan negara seperti apa. Pada saat itu presidennya MEGAWATI. Setelah Gusdur, kemudian Megawati bingung mau dibawa kemana negara ini. Lalu Demokrat dengan pak SBY tampil dengan menawarkan perubahan. Jadi orang rindu perubahan, perubahan seperti apa? Sesungguhnya orang tidak begitu faham. Tapi dengan melakukan perubahan, pasti yang namanya perubahan itu ke arah yang lebih baik. Daya tarik ini disempurnakan dengan sosok pak SBY, sosok gagah, jendral, kalem juga punya magnet di kalangan ibu-ibu dan kaum intelektual. Pendiri demokrat yang 9 orang itu 6 profesor, termasuk saya, Profesor Subur, Prof rompa, Prof Ramli, Prof saraggggih, Oleh karena itu citranya partai ini partai intelektual. Ke Publik dan ke luar. karena partai baru, kadernya berasal dari berbagai partai yang ada, dari PDIP, Partai Golkar dari semua partai ada. Makanya setelah itu dibentuk ideologi yaitu nasional religius.

Kemudian Pelatihan kader yang sesungguhnya baru terakhir dilakukan ya ini pada menjelang pemilu 2009. sebelumnya pertemua-pertemuan. Pertemuan kader, tapi lebih membangun komunikasi dan sosialisasi belum pelatihan kader. Sosialisasi gagasan, yang ditawarkan selalu partai politik cerdas, santun dan demokratis kemudian, Beberapa kali merupakan pertemuan kader, tapi belum merupakan kaderisasi.

Ada kriteria khusus untuk menjadi kader demokrat?

Belum ada. Pokoknya daftar. Yang awal jadi pengurus. Yang diundang adalah ketua sekretaris bendahara. tetapi yang ikut banyak. bukan pengurus juga banyak yang ikut. karena konsekwensi daya tarik itu. yang betul2 kaderisasi menjelang pemilu 2009, yaitu ketika democrat mencanangkan target 15 %, persyaratan pencalonan presiden th 2004 kan cm 2,5 %, partai yang memperoleh 2,5% dapat

mencalonkan presiden sendiri. uu tersebut akan diubah, democrat mengusulkan 15 % maka target 15% tiba2 PDIP dan Golkar berpikir lain mereka memasang angka 30 %. kemudian turun akhirnya menjadi 20%. setelah itu sadar klo democrat ga bisa 20% maka demokrat tidak bisa mencalonkan presiden sendiri kalau koalisi dengan orang akan akan tawar menawar. maka democrat menaikkan targetnya menjadi 20%. tetapi kemudian yang dilakukan kaderisasi untuk memompa semangat itu kita lakukan adalah per dpc diundang 4 orang, ketua sekretaris bendahara dan ketua bidang perempuan. betul-betul pelatihan kader. dilakukan di puncak satu angkatan 15 hari. oleh karena itu untuk seIndonesia 8 angkatan, bayangkan melaksanakan acara 8 kali 2 minggu. 3 bulan berturut, diakhiri dengan ketemu pak SBY di cikeas.karena 2 minggu maka materinya lengkap, tentang sejarah, anggaran dasar, visi, market politik, ideology termasuk outbond, maka setiap angkatan ketahuan siapa yang paling pinter . bagaimana berorganisasi. tampaknya kaderisasi seperti ini efektif. bergeraklah di daerah sehingga ketika pemilu 2009 luar biasa dengan politik market yang pas kita dapet 20%. ada satu hal yang orang tidak tau, kita ini melakukan berdasarkan penelitian pasar.contoh umpanya kita membuat iklan dengan lagu Indomie, pengamat mengatakan waduh ga kreaif, masa iklan pake lagu Indomie. kita ga tersinggung, karena lagu ini bukan untuk diuji oleh tim pengamat, kalau diuji tim juri kalah. ternyata lagu itu . kita uji coba ,kita mengambil 100 pengamen Jakarta, kita kasih seragam SBY Boediono, kita kasih honor sehari 100 ribu , mereka suruh mengamen di ternyata respon luar biasa. nah itu gagasan cemerlang yang ga pernah di;iri oleh pengamat.

terus dari pelatihan itu akan dilaksanakan secara rutin.

ya, tapi tidak di pusat tapi perdaerah.sekarang sudah mulai ada tetapi pert iga hari.

(lanjutan)

sekarang apa yang dilakukan demokrat ditiru oleh Golkar. Golkar melakukan pelatihan ada outboundnya

berkaitan dengan kader pemimpin. apakah kader2 terbaik itu akan dibidik pemimpin.

contoh Marzuki Alie terbaik pada waktu pelatihan. terbaik ketika memimpin kelompok. oleh karena itu dia dipilih menjadi ketua DPR. contoh seperti itu

Model kaderisasi di demokrat kedepan mau seperti apa?

kedepan kaderisasi Demokrat dibutuhkan membangun karakter politik, kultur politik. klo kemaren membangun mesin politik, konsolidasi organisasi. kedepan bukan membangun mesin tetapi pada sifat politik yaitu bagaimana berpolitik cerdas, santun, bersih dan demokrat. karena sesungguhnya kekuatan politik itu pada kesantunan. soft power

Ada target jumlah kader yang direkrut perperiode?

Sekarang belum, sudah menjadi tugas pengurus baru.nanti

Program pembinaan selain yang telah disebutkan program rutin apalagi yang dilakukan demokrat?

ada, tapi tidak di Pusat melainkan perdaerah. perprovinsi.

Ada program khusus peningkatan kapasitas kepemimpinan?

secara sistemik dilaksanakan, tapi tidak tetapi tidak terlalu sistemik, maka diskusi-diskusi kepemimpinan sesungguhnya merupakan kaderisasi. tetapi yang dilakukan secara sistemik belum ada. karena kesulitan waktu. pada dasarnya sesungguhnya kader elit itu selalu teraktualisasi

Kle anas itu berasal dari kader Demokrat juga?

Kalau Anas memang dia sebelumnya sudah aktivis, dia kan ketua PBHMI.

Berkaitan dengan kaderisasi, Ada kendala-kendala direkrutment,

pembinaan, pengembangan seperti?

kendalanya penyakit lama. yaitu perilaku yang dibawa sebelum dia di Partai Demokrat. terutama ketika ada orang baru, itu over acting menyingkirkan kader-kader yang lama. itu terjadi di semua partai.

Ada sistem reward dan punishment?

itu baru di program pada periode besok. sekarang ada tapi relatif ga jalan.

Setelah melakukan serangkaian proses kaderisasi sebenarnya kriteria pemimpin yang seperti apa yang diharapkan oleh demokrat?

pertama, pemimpin yang memahami aspirasi masyarakat, kemudian sadar tujuan membangun negara ini arahnya kemana, demokrat ini kan sesungguhnya sama tujuannya ingin membangun bangsa kedepan, hanya pilihannya itu apa, kita pilihannya pada semangat demokratisasi, recovery dan rekonsiliasi. Kemudian operasional itu lebih pada politik cerdas santun bersih dan demokratis. ini saja tidak mudah. orang tidak bisa langsung cerdas, lalu melakukan hal yang bodoh, orang tidak serta merta bisa bersih perilaku lama masih berlaku lama, kita tau ada pejabat Partai Demokrat yang juga kena masalah hukum, kadang-kadang kurang bersih dan kurang demokratis. ini merupakan tantangan .

Perbedaan sruktur kaderisasi dan bidang SDM

klo OKK kaitannya yang ngadain Musda, muscab kepengurusan, klo SDM itu adalah bagaimana merekrut orang-orang pintar. sekarang mnisalnya kita butuh tokoh2 muda.cari.

Strategi mencari bibit yang berbakat yang potensi?

mengundang tokoh, belum lama ini ada mengundang tokoh2 intelektual, tokoh muda, diundang ke cikeas diberi ceramah tentang partai demokrat dan masa depan yang diinginkan.

kan kaum intelektual kurang tertarik pada partaipolitik, kan aah partrai semua partai kotor.

kita ini partai demokrt ini juga rasional sehingga kaum intelektual jugamasu masuk.

Wawancara dengan Wahyu sebagai Presiden BEM Seluruh Indonesia Periode Tahun 2008-2009.

Begini, menurut anda system rekrutmen di Demokrat itu seperti apa ya?

Kalau kita berbicara tentang kaderisasi, dari awal mencetak orang....saya melihat kayak Golkar dan PKS mereka cukup Setle mereka cukup solid dengan kader-kadernya. kalau melihat demokrat kader-kadernya bukan hasil kaderisasi tapi memang ...kalau kita melihat orang-orang yang dimasukin ke demokrat ngambil dari orang-orang yang potensial gitu deh, itu bukan sistem kaderisasi tapi lebih ke rekrutmen yang sifatnya cari orang-orang yang apa ya, kira-kira dapat membesarkan lah..belum masuk ke ranah sistem pengkaderan. misalnya Anas tu bukan dibesarkan di Demokrat tapi di dari HMI terus kemudian di KPU dan masuk ke demokrat. Demokrat merekrut orang-orang potensial dan masuk menjadi kadernya.

Kalau Marzuki Alie, menurut anda kira-kira hasil pengkaderan Partai Demokrat?

Partai Demokrat ini partai baru, klo dibilang dia hasil kaderisasinya demokrat politisi-politisinya memang bahasanya bukan kaderisasi dari Demokrat, tapi mungkin Marzuki Alie merupakan salah satu dari pendiri atau orang awal dari demokrat. kalau kita bicara pengkaderan pendiri itu mengkader. kalau dilihat dari mengkader itu dari awal ikut serta kemudian jadi pengurus kemudian jadi petinggi, kemudian berikutnya masuk ke jenjang karir berikutnya. jadi, mungkin di sini kita harus samakan dulu definisi pengkaderan. yang dimaksud pengkaderan itu seperti apa? karena orang yang mendirikan itu termasuk bagian orang yang dikader. Sementara salah satu definisi yang saya tahu pengkaderan itu bagaimana sistem mencetak pengganti-pengganti orang yang mendirikan ini, regenerasi. yang penting itu regenerasi.

Menurut anda di demokrat belum ada standarisasi kaderisasi?

belum ada, tapi mungkin proses ada, misalkan yang biasa kita dapetin seperti ini saya sering mendapati para pemimpin itu mereka punya faksi-faksi, misalkan Anas dengan siapa itu bisanya punya turunan-turunannya. kalau kita melihat itu mungkin tetapi dibalik itu sesuatu yang belum kita ketahui adalah misalkan untuk secara masif ya, siapa

mengkader siapa dalam artian tidak tersistem tapi disitu tidak ada sistem. contohnya anak-anak SBY si Ibas secara sistem sebenarnya kan tidak ada. secara titipan didampingi oleh Anas bagaimana memantau perkembangannya itu bagian dari kaderisasi tapi belum bisa dikatakan sistem, baru secara personal aja. misalkan Golkar, Golkar kan kemudian mereka mencetak kader-kadernya itu dari awal itu dari alumni-alumni HMI kalau kita tahu kan banyak alumni-alumni HMI yang masuk ke sana, ya mungkin itu salah satu tempat atau sarana untuk mengkader anak-anaknya untuk masuk ke politik kemudian menjadi pengurus...mereka menyediakan wadah untuk para pemudanya kemudian setelah itu mereka berdayakan dari mulai bawah kemudian masuk ke struktur akhirnya kita melihat sekarang seperti Akbar Tanjung segala macam, yang sebelumnya pernah berkiprah mereka kan alumni-alumni hasil dari didikan kaderisasi dari wadah itu.

Golkar sudah melakukan kaderisasi yang bagus?

heumeu (iya)

Kalau demokrat itu punya organisasi kayak Golkar ga seperti HMI atau Underbounya lah?

Sampai saat ini, saya pernah mendengar sebenarnya apa ya, barisan pemuda demokrat. baru kemaren sempet ada di beberapa daerah tapi belum terlalu masif ya. waktu pernah dikenalkan di kalimantan sempet mendengar tetapi belum secara masif sampai struktur DPW DPD. kalau kita berfikir, kan kaderisasinya memang sederhana. atau contoh lainnya PKS memang cukup jelas dengan mentoring pekanan, Sebagai salah satu mentoring untuk kader-kadernya kemudian di tempatkan. Walaupun secara tertulisnya tidak ada tapi itukan sistem yang ada di sana, pengkaderan itu. PKS pun ngambil orang-orang yang kemudian menjadi pemimpin atau menjadi anggota-anggota dewan hasil dari penilaian utama adalah bagaimana kiprahnya dari awal melewati fase-fase kaderisasi dengan jelas. Nah kalau saya melihat di demokrat itu belum ada neh wadah pemuda yang kemudian sarana untuk mengkader, mematangkan anak-anaknya yang kemudian menjadi struktur di partainya.

Sekarang mengenai Penjenjangan, Seberapa penting penjenjangan itu dalam sebuah kaderisasi dan penjenjangan di demokrat seperti apa? ada atau belum ada, kalau ada jalan apa tidak?

Penjenjangan sebenarnya gambaran kecilnya ya kayak kita sekolah, ya artinya setiap jenjang itu ada hak dan kewajiban yang berbeda, seperti itu. pun dengan keanggotaan, misalkan suatu organisasi atau komunitas melakukan penjenjangan karena memang kader itu ada yang awal kemudian ada yang sudah mengikuti satu fase atau melewati fase yang lain itu karena, mengapa mereka naik jenjang karena mempunyai kafa'ah (kemampuan) tertentu.. nah kalau dari sini pentingnya penjenjangan itu menurut saya adalah melihat atau mengevaluasi terutama dalam posisi partai adalah kapasitas, pemahaman dia tentang partai itu sendiri kemudian yang kedua bagaimana hak dan kewajiban itu dibagi, misalkan

Kalau bicara di sini PKS ada kader-kadernya yang kader inti, ada kader muda, kader madya, dan itu kan beda kewajiban, beda hak gitu. setiap fase itu beda. Untuk partai Demokrat saya ga tau penjenjangannya seperti apa, karena tadi melihat sistem Kaderisasi Demokrat, kaderisasinya belum terstruktur, belum secara masif .

Jadi kalau menurut ant Partai Demokrat itu kemaren menang Pemilu itu karena apa? apakah semata-mata karena figur SBY atau kaderisasinya yang baik?

Kalau saya masih melihat ya kalau Demokrat ya SBY, sementara kekuatan figurinya luar biasa terbukti. beberapa penelitian di beberapa daerah2, berapa sih sumbangan partai berapa sih sumbangan figur, persentase dalam kemenangan pemilu pilkda misalnya. ternyata memang lebih besar persentase sumbangan figur, dalam hal ini saya masih melihat figur SBY sangat kuat. Untuk Demokrat, Demokrat ini selain memang pertama mesin partai, sebenarnya kekuatan utamanya kekuatan figur SBY.

Bukan karena kesolidan Kadernya?

Termasuk dalam pemilu caleg. Dalam pemilu caleg, masih didapati masyarakat bilang nah ini dari demokrat tho, pasti mengarahnya ke SBY. figur SBY itulah yang

dikampanyekan. Mereka cerdas karena yang menjadi kekuatan SBY, maka dalam kampanye-kampanye caleg-caleg itu mengatas namakan diri SBY gitu. Orang tidak bisa membedakan. Di masyarakat itu tidak bisa membedakan mana pemilihan caleg mana pemilihan presiden. Demokrat lebih awal, dia mengawali kampanyenya dengan foto-foto SBY tu sudah banyak. Saya melihat di daerah kader-kader partai Demokrat ini mereka memampang di sebelahanya foto SBY, disandingkan.

(Kembali lagi ke Sistem kaderisasi) Jadi bisa dikatakan dari uraian anda tadi, kaderisasi demokrat itu ga Jalan ?

Secara sistem belum jalan, belum terlihat baru secara person to person.

Menurut Anda di Mereka ada Sistem Reward dan Punishment ga sih?

Kalau di Demokrat, Sistem punishment dan reward itu kan dalam organisasi modern menjadi suatu hal untuk meningkatkan prestasi. Berbicara modern adalah semuanya adalah rangsangan, prestasi itu didongkrak dengan salah satu caranya dengan adanya reward bagi yang berprestasi, punishment kemudian jika dia tidak berprestasi. Dalam hal ini, saya belum melihat, jujur belum punya referensi mengenai reward dan punishment yang diterapkan di Demokrat. Misalnya ada kader yang berprestasi diapakan dan kemudian dalam hal penanganan yang bermasalahpun belum melihat. karena belum ada ketegasan, misalnya ada indikasi kader-kadernya melakukan suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya melanggar hukum, dengan tegas Demokrat mengambil sikap atau segala macam belum terlalu nyaring disuarakan.

Waktu itu kasus korupsi yang ketangkap KPK yang salah satunya adalah kader Demokrat, masih sangat kabur lah kabarnya seperti diapakan atau sikap seperti itu belum tegas, termasuk yang rward juga belum melihat contoh di demokrat.

Diantara Partai-partai ini partai manakah menurut Anda yang kaderisasinya sudah bagus atau dapat diperhitungkan?

Kalau bicara kaderisasi, sebenarnya ini bukan subyektif, karena melihat melihat semuanya ada dua, PKS dan Golkar memiliki kader yang solid karena mereka melalui sistem yang tertempa. Kalau Golkar memiliki Underbouw, dulu pemuda Pancasila,

artinya dari bawah itu underbouw-underbouw itu berjalan secara masif termasuk sarana-sarana untuk mengambil suara-suara atau partisipasi masyarakat lewat LSM-LSM yang mereka. Walaupun HMI tidak dikaitkan dengan Golkar tapi secara tidak tertulis pada waktu itu memang banyak kader-kader HMI yang jadi Chanel-chanel Golkar dan sistem itu berjalan terus akhirnya banyak kader HMI yang masuk ke Golkar begitu juga dengan PKS, PKS itu kan punya sistem tarbiyah mempunyai kekuatan tersendiri untuk melakukan pengkaderan, karena dari sana selain pemahaman tentang visi misi perjuangan yang dilakukan oleh PKS sendiri, PKS juga menempa militansi kader-kadernya, walaupun kemudian ada penjenjangan, ada muda madya, inti dan segala macam bagian untuk melihat konsistensi dan militansi. walaupun memang sekarang belum melihat yang muda banget menjadi pemimpin di struktur.

Kesimpulannya PKS pun dengan kaderisasi yang terstrukturpun masih belum ada regulasi. Posisi-posisi atasnya masih pendahulu-pendahulunya. Sementara yang anak muda ini masih belum mempunyai porsi-porsi yang lebih. kita melihat yang paling muda ini ya seangkatan Fahri Hamzah atau Rama itu kan angkatan 98. sekarang ini yang masuk di tataran atas tu belum ada, regulasinya belum ada. Walaupun memang sudah ada sistemnya.

Kembali Ke Demokrat, menurut anda Program pelatihan/Kursus Kader dan pembinaannya jalan ga sih?

Saya Ga tau jalan atau tidaknya. tidak mengikuti agenda-agenda internal.

Secara Kesimpulannya gimana neh, Demokrat tu kayak gimana?

Kesimpulan, Demokrat ini kalau dari sisi sih menjanjikan dalam artian kemudian Demokrat ini mengambil pangsa pasar yang di tengah ke bawah mereka bisa menyentuh dan ke atas mereka bisa menyentuh, mungkin masa ngambang atau orang-orang yang akademisi. Memang mereka cukup pinter dalam memilih pangsa pasar, jadi mapping pasarnya cukup oke. Kemudian dari sisi kaderisasi sistem rekrutmen dari Demokrat sendiri masih sama layaknya partai-partai yang lainnya dalam artian mereka belum punya struktur yang jelas, tersistem gitu. mungkin gerakan kaderisasi ada tapi sistem ini belum mengintegral kepada masyarakat, belum mampu mencetak orang-orang yang siap

menggantikan. karena salah satu indikator adanya sistem itu program yang jelas dan diterjemahkan dalam sarana-sarana, nah saya belum melihat itu.



AD/ART PARTAI DEMOKRAT

PEMBUKAAN

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara yang demokratis, meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, menjamin hak asasi manusia, dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kehidupan bangsa yang cerdas, serta mampu memberikan sumbangan untuk kemerdekaan bagi setiap bangsa, ketertiban untuk kemerdekaan bagi setiap bangsa, dan perdamaian abadi.

Bahwa perjalanan bangsa sampai lahirnya reformasi, adalah pengalaman bersama sebagai bangsa yang diterima apa adanya untuk kemudian diambil sebagai pelajaran berharga dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara hukum, kedaulatan ditangan rakyat dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berbagai kelemahan bahkan penyelewengan di masa lalu terlebih yang menyebabkan kemerosotan harkat dan martabat bangsa di mata internasional, harus melahirkan kesadaran baru bagi setiap warga Negara Indonesia untuk memperkokoh sikap, nasionalisme, humanisme, dan pluralisme yang didasarkan pada kebebasan dan kemerdekaan yang dijiwai oleh nilai moral dan agama.

Bahwa setiap warga Negara Indonesia adalah manusia bebas yang memiliki hak asasi berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang menjadikan setiap manusia adalah mulia dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan hidup dan kehidupan yang damai, demokratis, dan sejahtera. Oleh karena itu menjadi tugas penting setiap warga Negara untuk menentang segala perilaku yang dapat merusak usaha-usaha perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Pikiran-pikiran dan tindakan otoriter, sewenang-wenang dan pemasangan terhadap hak-hak warga Negara yang berakibat terjadinya ketidakadilan, kepincangan sosial, kehancuran ekonomi bangsa, harus dihentikan dengan perjuangan yang terencana dan teratur.

Meyakini bahwa perjuangan itu hanya dapat berhasil dengan ridha Allah yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa, serta usaha-usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras, penuh kebijaksanaan, serta berkelanjutan dan berkesinambungan, maka seraya memohon ridha Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 9 September 2001 didirikan partai politik yang modern dan terbuka bagi segenap warga bangsa dengan nama "PARTAI DEMOKRAT", untuk masa waktu yang tak terbatas dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN, ASAS, JATI DIRI, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 1

Nama Dan Kedudukan

Partai ini diberi nama PARTAI DEMOKRAT, yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan berkedudukan hukum di Ibukota Negara.

**Pasal 2
Asas**

Partai Demokrat berasaskan Pancasila.

**Pasal 3
Jati Diri**

Jati diri partai adalah Nasionalis-Religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek humanisme, nasionalisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

**Pasal 4
Sifat**

Partai Demokrat bersifat terbuka untuk semua warga Negara Republik Indonesia, tanpa membedakan ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

**Pasal 5
Tujuan**

Partai Demokrat bertujuan :

1. Menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai jiwa Proklamasi Kemerdekaan.
2. Mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
3. Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, pluralisme dan humanisme.
4. Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang demokratis, sejahtera, maju dan modern, dalam suasana aman dan penuh kedamaian lahir dan batin.

**BAB II
ATRIBUT**

Pasal 6

Partai Demokrat mempunyai atribut yang terdiri dari Lambang, Panji- Panji, Hymne dan Mars.

(lanjutan)

Pasal 7 Lambang

1. Partai Demokrat memiliki lambang yang berupa gambar bintang, bersinar tiga arah dengan warna merah putih pada kedua sisinya dengan latar belakang warna dasar biru tua dan biru laut
2. Bintang Merah Putih bersegitiga bermakna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan :
 - a. Nasionalis-Religius; yang bermakna wawasan nasionalis, serta sekaligus bermoral agama.
 - b. Pluralisme; yang bermakna mengakui dan menghargai serta merangkul berbagai dan semua ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama dan kepercayaan terhadap TUHAN YANG MAHA ESA, serta keberadaan ciri khas setiap daerah yang menyatu sebagai Bangsa Indonesia.
 - c. Humanisme; yang bermakna mengakui dan menjunjung tinggi nilai dan martabat perikemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti bahwa Bangsa Indonesia adalah bagian yang integral dari masyarakat dunia.
3. Warna Biru Laut yang terdapat di tengah, melambangkan kesejukan penuh kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam perjuangan dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa.
4. Warna Biru Tua yang terdapat pada bagian atas dan bawah, melambangkan bahwa dalam memperjuangkan dan mengupayakan terwujudnya cita-cita bangsa, maka bersikap tegas, mantap, percaya diri dan penuh optimisme yang senantiasa menjadi ciri utama yang harus dianut semua unsur bangsa dan masyarakat.
5. Warna Merah Putih di masing-masing sisi bintang dengan latar belakang Biru Laut, memberi arti warna Merah Putih adalah kebangsaan atau nasionalisme, dan warna Biru arti Humanisme di tengah pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia atau internasionalisme, yang merupakan wawasan Partai Demokrat.
6. Warna dasar Biru Laut, seperti halnya samudera yang membentang luas sebagai terminal akhir bagi aliran dan muara dari berbagai sungai yang membawa segala macam limbah, membaur dan menyatu menjadi jernih, namun terlihat berwarna kebiruan, tenang, damai, demikian pula halnya Partai Demokrat, tampil sebagai partai politik yang mampu menghimpun segenap warga Negara Indonesia untuk hidup bersama dan berdampingan secara damai, dan saling menghormati antar sesama anak bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan.

(lanjutan)

Pasal 8
Panji, Hymne dan Mars

Panji, Hymne dan Mars ditetapkan oleh Kongres

BAB III
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9
Anggota

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diterima menjadi anggota Partai Demokrat.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10
Tingkat Kepengurusan

Tingkatan Kepengurusan Partai Demokrat terdiri dari:

- a. Tingkat Pusat, disebut Dewan Pimpinan Pusat.
- b. Tingkat Provinsi, disebut Dewan Pimpinan Daerah.
- c. Tingkat Kabupaten/ Kota, disebut Dewan Pimpinan Cabang.
- d. Tingkat Kecamatan, disebut Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- e. Tingkat Kelurahan atau Desa, disebut Dewan Pimpinan Ranting.
- f. Tingkat RW/ Dusun disebut Pimpinan Anak Ranting.

BAB IV
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 11
Wewenang Pengurus

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi Partai yang kepengurusannya bersifat kolektif.
2. Dewan Pimpinan Pusat berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan Tingkat Nasional sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional serta Peraturan Partai lainnya.
 - b. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Daerah.

(lanjutan)

c. Membentuk Badan Kehormatan Partai, Dewan Pakar Partai dan lembaga-lembaga yang dipandang perlu.

3. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya.

b. Memberikan pertanggung jawaban pada Kongres.

Pasal 12 Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah pelaksana Partai ditingkat Provinsi yang kepengurusannya bersifat kolektif.

2. Dewan Pimpinan Daerah berwenang :

a. Menentukan kebijakan Tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional serta Peraturan Partai lainnya.

b. Mensahkan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Cabang.

3. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban :

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Keputusan Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi serta Peraturan Partai lainnya.

b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi.

Pasal 13 Dewan Pimpinan Cabang

1. Dewan Pimpinan Cabang adalah pelaksana Partai di tingkat Kabupaten/ Kota yang kepengurusannya bersifat kolektif.

2. Dewan Pimpinan Cabang berwenang :

a. Menentukan kebijakan Tingkat Kabupaten / Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional, Rapat Tingkat Daerah serta Peraturan Partai lainnya.

b. Mensahkan komposisi Personalia Dewan Pimpinan Anak Cabang.

3. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban :

- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional, Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi maupun Musyawarah Daerah tingkat Kabupaten/ Kota serta Peraturan Partai lainnya.
- b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah tingkat Cabang.

Pasal 14

Dewan Pimpinan Anak Cabang

1. Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah pelaksana Partai di tingkat Kecamatan yang kepengurusannya bersifat kolektif.
2. Dewan Pimpinan Anak Cabang berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan Tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Partai lainnya.
 - b. Mensahkan Komposisi Personalia Pimpinan Ranting.
3. Dewan Pimpinan Anak Cabang berkewajiban :

- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, dan Rapat Tingkat Nasional, Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/ Kota, Tingkat Kecamatan serta Peraturan Partai lainnya.
- b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah tingkat Anak Cabang.

Pasal 15

Dewan Pimpinan Ranting

1. Dewan Pimpinan Ranting adalah pelaksana Partai di Tingkat Kelurahan/Desa yang kepengurusannya bersifat kolektif.
2. Dewan Pimpinan Ranting berwenang:
Menentukan kebijakan Tingkat Kelurahan / Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional, Musyawarah Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/ Kota, Tingkat Kecamatan serta Peraturan Partai lainnya.

(lanjutan)

3. Dewan Pimpinan Ranting berkewajiban :

- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, dan Rapat Tingkat Nasional, Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kelurahan/ Desa serta Peraturan Partai lainnya.
- b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah tingkat Ranting.

Pasal 16
Pimpinan Anak Ranting

1. Pimpinan Anak Ranting adalah pelaksana Partai ditingkat Rukun Warga (RW) atau sejenisnya yang kepengurusannya bersifat kolektif.
2. Komposisi Personalia Pimpinan Anak Ranting disahkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.
3. Pimpinan Anak Ranting berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Rukun Warga (RW) atau sejenisnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten dan Kota, Tingkat Kecamatan serta peraturan partai lainnya.
 - b. Memberikan pertanggung jawaban

BAB V
DEWAN PEMBINA DAN MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI

Pasal 17
Dewan Pembina

1. Partai Demokrat mempunyai Dewan Pembina untuk tingkat pusat.
2. Dewan Pembina merupakan badan yang memberikan pembinaan, saran, dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Pasal 18
Majelis Pertimbangan Partai

1. Partai Demokrat memiliki Majelis Pertimbangan Partai pada setiap tingkat organisasi.

2. Majelis Pertimbangan Partai mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Partai Demokrat sesuai dengan tingkatan organisasi, baik diminta maupun tidak diminta.

3. Pengaturan lebih lanjut yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI FRAKSI

Pasal 19 Kedudukan dan Fungsi Fraksi

1. Partai Demokrat mempunyai Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di semua tingkatan.

2. Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah badan pelaksana kebijakan Partai Demokrat di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di semua tingkatan untuk memperjuangkan visi, misi, program, maksud dan tujuan Partai Demokrat maupun aspirasi dan kepentingan rakyat untuk mewujudkan cita-cita Bangsa.

3. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ORGANISASI LAINNYA

Pasal 20 Pola Hubungan

1. Partai Demokrat dapat menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Partai Demokrat dapat menjalin hubungan kerjasama dengan Partai Politik lainnya baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pola hubungan tersebut diatas ditetapkan dengan peraturan organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

BAB VIII
KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 21
Tingkatan Kongres, Musyawarah dan Rapat

1. Kongres, Musyawarah dan Rapat Partai Demokrat terdiri atas :

- a. Kongres.
- b. Kongres Luar Biasa.
- c. Rapat Pimpinan Nasional
- d. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional.
- e. Rapat Kerja Tingkat Nasional.
- f. Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Pusat.
- g. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
- h. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat
- i. Musyawarah Daerah.
- j. Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- k. Rapat Koordinasi Daerah.
- l. Rapat Kerja Tingkat Daerah.
- m. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah.
- n. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah.
- o. Musyawarah Cabang.
- p. Musyawarah Cabang Luar Biasa,
- q. Rapat Koordinasi Cabang.
- r. Rapat Kerja Tingkat Cabang.
- s. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang.
- t. Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang.
- u. Musyawarah Anak Cabang.
- v. Rapat Koordinasi Anak Cabang.
- w. Rapat Kerja Tingkat Anak Cabang.
- x. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- y. Rapat Harian Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- z. Musyawarah Ranting.
- aa. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting.
- bb. Rapat Harian Dewan Pimpinan Ranting
- cc. Rapat Harian Pimpinan Anak Ranting.
- dd. Rapat Pleno Pimpinan Anak Ranting.

2. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Partai, diadakan sedikitnya sekali dalam lima tahun dan berwenang :

- a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Menetapkan Program Umum Partai.
- c. Menilai Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat

d. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat.

e. Menetapkan Keputusan- Keputusan lainnya.

3. Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Kongres, dengan ketentuan :

a. Diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat apabila kelangsungan hidup partai dalam keadaan terancam dan menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa serta apabila Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres.

b. Diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 (setengah) dari Dewan Pimpinan Cabang. Apabila Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres.

c. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut.

4. a. Rapat Pimpinan Paripurna diadakan bila diperlukan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat dan berwenang mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi kewenangan Kongres sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a, b, c dan d.

b. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

5. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional diadakan bila dipandang perlu atas undangan Dewan Pimpinan Pusat, untuk melakukan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi terhadap masalah nasional tertentu, kecuali yang menjadi wewenang Kongres sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a, b, c dan d.

6. Rapat Kerja Tingkat Nasional diadakan bila dipandang perlu atas undangan Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas dan menjabarkan program-program penting yang dipandang perlu untuk dilaksanakan ditingkat Daerah.

7. a. Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dan undangan lainnya yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

b. Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Pusat (DPP) diadakan sekurang- kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

(lanjutan)

8. a. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Para Ketua, Sekretaris Jenderal, Para Wakil Sekretaris, Bendahara, Para Wakil Bendahara.

b. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) diadakan sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.

9. Musyawarah Daerah diadakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:

- a. Menyusun Program Kerja Partai Tingkat Daerah.
- b. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah.
- c. Memilih Dewan Pimpinan Daerah.
- d. Menetapkan keputusan- keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.

10. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah dengan ketentuan kecuali butir a pada ayat 9.

11. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah analog dengan rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat yang diusulkan dengan kondisi organisasi didaerah.

12. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah analog dengan rapat harian Dewan Pimpinan Pusat yang di sesuaikan dengan kondisi organisasi Daerah.

13. Rapat Pleno dan Rapat Harian Dewan Pimpinan pada strata berikutnya analog dengan ayat 11 dan 12 diatas.

14. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah dengan ketentuan kecuali butir a. pada ayat 9.

15. Musyawarah Cabang diadakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:

- a. Menyusun Program Kerja Partai Tingkat Cabang.
- b. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang.
- c. Memilih Dewan Pimpinan Cabang.
- d. Menetapkan keputusan- keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.

16. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah cabang dengan ketentuan kecuali butir a pada Ayat 15.

17. Musyawarah Anak Cabang diadakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang :

- a. Menyusun Program Kerja Partai Tingkat Anak Cabang.
- b. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- c. Memilih Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- d. Menetapkan keputusan- keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.

18. Musyawarah Ranting diadakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:

- a. Menyusun Program Kerja Partai Tingkat Ranting.
- b. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Ranting.
- c. Memilih Pimpinan Ranting.
- d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.

19. Rapat Kerja Tingkat Nasional diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Umum Partai.

20. Rapat Kerja Tingkat Daerah diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Umum Partai.

21. Rapat Kerja Tingkat Cabang diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Umum Partai.

22. Rapat Kerja Tingkat Ranting diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Umum Partai.

23. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan oleh masing-masing tingkatan kepengurusan yang di hadiri oleh seluruh unsur kepengurusan yang terdiri Dewan Pimpinan, Majelis Pertimbangan dan Fungsiaris Dewan Pimpinan berwenang menetapkan keputusan-keputusan dalam rangka pelaksanaan Program Umum Partai sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

24. Rapat Harian, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) minggu yang dihadiri oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan sesuai tingkatan kepengurusan berwenang mengadakan penilaian dan merencanakan kegiatan umum Partai.

25. Musyawarah Dewan Pimpinan Ranting diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:

- a. Menyusun Program Kerja Partai Tingkat Anak Ranting.
- b. Menilai pertanggung jawaban Pimpinan Anak Ranting.
- c. Memilih Pimpinan Anak Ranting.
- d. Menetapkan keputusan- keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.

26. Rapat Pimpinan Anak Ranting :

- a. Diadakan oleh Pimpinan Anak Ranting sekurang- kurangnya sekali dalam sebulan.

(lanjutan)

- b. Melaksanakan kebijakan partai ditingkat Rukun Warga (RW) atau sejenisnya.
- c. Menyusun program kerja partai ditingkat Rukun Warga (RW) atau sejenisnya.

Pasal 22 Peserta

Peserta Kongres, Musyawarah dan Rapat Partai sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat 1, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23 Kuorum Dan Pengambilan Keputusan

1. Kongres, Musyawarah dan Rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dan setengah jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
4. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar :
 - a. Sekurang- kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta harus hadir.
 - b. Keputusan adalah sah apabila dengan persetujuan sekurang- kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta hadir.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 24 Perolehan Keuangan

Keuangan diperoleh dari:

1. Iuran Anggota
2. Iuran Anggota Fraksi di semua tingkatan.
3. Sumbangan dari simpatisan partai baik pribadi maupun institusi yang tidak mengikat dan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

**BAB IX
PEMBUBARAN PARTAI DEMOKRAT**

**Pasal 25
Ketentuan Perubahan**

1. Pembubaran Partai Demokrat hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres yang khusus diadakan untuk itu, dengan ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 1.
2. Dalam hal Partai Demokrat dibubarkan, maka kekayaannya dapat diserahkan kepada badan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

**BAB X
PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 26
Peraturan Peralihan**

1. Selama peraturan-peraturan dan badan-badan belum dibentuk, maka berlaku keputusan-keputusan yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Tanpa mengurangi ketentuan dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2, hal-hal yang dalam Anggaran Dasar ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang kepartaian, diadakan penyesuaian dan di putuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat, dan dipertanggung jawabkan dalam Kongres.

**BAB XI
PENUTUP**

**Pasal 27
Hal-Hal Lain**

1. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI DEMOKRAT

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Persyaratan Menjadi Anggota

1. Persyaratan menjadi Anggota yang dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

a. Setiap warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dari Anggaran Dasar yang ingin menjadi anggota Partai, menyampaikan permohonan kepada Dewan Pimpinan Cabang melalui Anak Cabang Partai di Kecamatan atau setingkat, maupun melalui Ranting Partai di Kelurahan/Desa.

b. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh partai.

c. Tidak merangkap sebagai anggota dari Partai Politik lainnya.

d. Di tempat-tempat yang belum ada Pimpinan Ranting Partai di Kelurahan/Desa, maupun Anak Cabang Partai di Kecamatan, maka permohonan dimaksud ayat 1. a. dapat disampaikan langsung kepada Dewan Pimpinan Cabang.

e. Melakukan Pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

f. Sesudah pendaftaran tersebut pada ayat 1.e. kepada pemohon diberikan status Anggota dan berhak menerima Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat.

2. Keanggotaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 dari Anggaran Dasar diatur sepenuhnya oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 2 Kewajiban Anggota

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Mentaati Keputusan-Keputusan Partai yang telah diambil dengan sah, serta menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan Keputusan-keputusan tersebut.

3. Menunjang kegiatan Partai, serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.

**Pasal 3
Hak Anggota**

1. Mengikuti kegiatan Partai yang diperuntukkan bagi seluruh Anggota.
2. Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pimpinan Partai atau jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh Partai.
3. Memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada Dewan Pimpinan Partai dengan cara sebaik-baiknya dan sesuai mekanisme Partai.

**Pasal 4
Pemberhentian Anggota**

Anggota Partai berhenti sebagai Anggota karena :

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis.
3. Diberhentikan.

**Pasal 5
Tata Cara Pemberhentian Anggota**

1. Anggota dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara karena sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas dan tujuan dari Partai.
2. Keputusan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan Keputusan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh setingkat di atasnya oleh setiap Dewan Pimpinan Partai.
3. Dalam hal seorang Anggota yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan Partai, maka pemberhentian sementara itu dilakukan oleh tingkat Pimpinan yang lebih tinggi atas usulan Dewan Pimpinan Partai yang bersangkutan.
4. Keputusan pemberhentian sementara anggota diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Partai.
5. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota selaku pengurus Dewan Pimpinan Partai sebagaimana diatur pada ayat 3 pasal ini diputuskan melalui rapat Pleno Dewan Pimpinan Partai setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari.
6. Anggota yang diberhentikan atau diberhentikan sementara, dapat mengajukan banding kepada kewenangan Dewan Pimpinan Partai yang lebih tinggi sampai dengan Kongres.

(lanjutan)

Pasal 6

PENGISIAN LOWONGAN ANTAR WAKTU YANG BUKAN PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PARTAI

1. Anggota Pleno Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional.
2. Anggota Pleno Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi) ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui serta disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Anggota Pleno Dewan Pimpinan Cabang (Kabupaten/Kota) ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang dan direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Daerah untuk disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Anggota Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang (Kecamatan/sejenisnya) ditetapkan dalam Rapat Harian Pengurus Anak Cabang dan direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Cabang untuk disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
5. Anggota Pleno Pimpinan Ranting (Kelurahan/sejenisnya) ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Ranting dan direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang untuk disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
6. Anggota Pleno Pimpinan Anak Ranting direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Ranting untuk disahkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC).
7. Pengurus Pergantian Antar Waktu menggantikan sisa masa jabatan pengurus yang digantikannya.
8. Sisa masa jabatan yang digantikannya minimal 1 (satu) tahun dan apabila kurang dari 1 (satu) tahun tidak diperlukan Pergantian Antar Waktu.

BAB II DEWAN PEMBINA

Pasal 7

Komposisi Dewan Pembina

1. Susunan Dewan Pembina berjumlah 9 (sembilan) orang dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
2. Ketua Dewan Pembina mengangkat Anggota Dewan Pembina yang terdiri dari tokoh dan sesepuh Partai Demokrat

Pasal 8
Kedudukan dan Tugas Dewan Pembina

1. Tugas Dewan Pembina adalah mengarahkan Perjuangan Partai Demokrat untuk mencapai visi dan misi Partai.
2. Memberikan pembinaan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan seluruh jajaran Partai agar tetap konsisten dengan konstitusi dan program Partai.
3. Menerima laporan Berkala Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

BAB III
SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 9
Pengurus Partai

Pengurus Partai terdiri dari :

1. Tingkat Pusat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Tingkat Provinsi adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
3. Tingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
4. Tingkat Kecamatan/sejenisnya adalah Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC).
5. Tingkat Kelurahan/sejenisnya adalah Dewan Pimpinan Ranting (DPRt).
6. Tingkat Rukun Warga (RW)/sejenisnya adalah Pimpinan Anak Ranting (PART).
7. Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) terdiri dari :
 - a. Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Biro-Biro.
 - b. Perwakilan Partai di Luar Negeri (DPLN) dibentuk disuatu Negara dan atau gabungan dari beberapa Negara.
 - c. Komposisi Personalia dari Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 10
Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pimpinan tertinggi sebagai pelaksana dari keputusan-keputusan Kongres, serta memimpin selama 1 (satu) periode antara 2 (dua) Kongres.
2. Dewan Pimpinan Pusat mewakili partai dalam tindakan ke dalam dan ke luar.

Pasal 11
Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Keputusan Partai.
2. Menetapkan strategi perjuangan partai dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan Partai.
3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Daerah-Daerah dan Cabang-Cabang Partai didalam melaksanakan keputusan-keputusan dan garis-garis kebijakan Partai serta ketentuan-ketentuan organisasi partai.
4. Memberikan arahan dan pedoman atas kegiatan-kegiatan Fraksi didalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Mengatur keseragaman, kerjasama dan koordinasi perjuangan Partai didalam dan luar Lembaga-Lembaga Negara.
6. Menyampaikan laporan lengkap kepada Kongres tentang seluruh kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat baik kedalam maupun keluar.
7. Menyampaikan pertanggung jawaban kepada Kongres tentang pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres yang diamanatkan pada Dewan Pimpinan Pusat maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pusat baik kedalam maupun keluar.
8. Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Pembina.

Pasal 12
Hak Dewan Pimpinan Pusat

1. Membuat peraturan-peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kebijakan demi kelancaran usaha-usaha Partai dalam rangka pelaksanaan Keputusan Kongres.
2. Mengesahkan Susunan Dewan Pimpinan Daerah

(lanjutan)

3. Memberhentikan seorang Anggota atau Anggota Pimpinan Partai disemua tingkatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga.
4. Melalui Rapat Pleno Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang atau Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang apabila Keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa.
5. Bertindak mewakili Partai, secara keseluruhan dalam menghadapi masalah-masalah Nasional dan dalam mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan internasional.
6. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN) Partai Demokrat.

Pasal 13 **Mekanisme Kerja Dewan Pimpinan Pusat**

1. Dewan Pimpinan Pusat dalam kepengurusannya bekerja secara kolektif.
2. Dalam hal-hal yang mendesak, Ketua Umum segera mengundang dan menyelenggarakan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, yang hasilnya dipertanggung jawabkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 14 **Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat**

1. Ketua Umum, satu atau lebih wakil ketua umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan wakil-wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat yang merupakan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat, dipilih oleh Kongres untuk memimpin 1 (satu) periode masa jabatan antara 2 (dua) Kongres dan dapat dipilih kembali. Sedangkan Ketua dan anggota-anggota Majelis Pertimbangan Partai Departemen, badan, lembaga dan Dewan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat terpilih.
2. Ketua-Ketua Departemen adalah Anggota Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 15 **Departemen Lembaga dan Badan**

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Departemen-Departemen dan Lembaga-lembaga yang bidang dan jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Pengurus Harian.
2. Ketua Departemen, Lembaga dan badan adalah Anggota Pleno dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pasal 16
Majelis Pertimbangan Partai

1. Susunan personalia dari Majelis Pertimbangan Partai terdiri dari; Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota.
2. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 dari Anggaran Dasar, Majelis Pertimbangan Partai berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat semua masalah dalam hubungan dengan ketentuan Pasal 8, 9 dan pasal 10 dari Anggaran Rumah Tangga, baik diminta maupun tidak diminta, agar bertindak sesuai dengan Partai, Keputusan Kongres, Keputusan dan Peraturan Partai.
3. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dalam ayat 1 dan Pasal 16 ayat 2 dari Anggaran Dasar, Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan Partai hendaknya mencakup unsur-unsur tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Rohaniawan, Ulama dan Cendekiawan.
4. Pertimbangan-pertimbangan Majelis, diputuskan dalam Rapat Majelis yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota Majelis.
5. Majelis Pertimbangan Partai terdiri dari :
 - a. Tingkat Pusat adalah Majelis Pertimbangan Pusat (MPP).
 - b. Tingkat Daerah (Provinsi) adalah Majelis Pertimbangan Daerah (MPD).
 - c. Tingkat Cabang (Kabupaten/Kota) adalah Majelis Pertimbangan Cabang (MPC).
 - d. Tingkat Anak Cabang (Kecamatan) adalah Majelis Pertimbangan Anak Cabang (MPAC).
 - e. Tingkat Ranting (Kelurahan/Desa) adalah Majelis Pertimbangan Ranting.
6. Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya melalui Rapat Pengurus Harian.

Pasal 17
Badan Kehormatan

1. Badan Kehormatan adalah badan yang membidangi masalah etik dan moral bagi Anggota atau Anggota Pengurus Partai secara keseluruhan
2. Badan Kehormatan dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari kalangan pengurus Partai Demokrat sesuai kebutuhan.

3. Badan Kehormatan bertugas untuk memberi masukan etik dan moral kepada Dewan Pimpinan Pusat terhadap Anggota atau Anggota Pengurus yang melanggar disiplin dan ketentuan partai

Pasal 18
Badan Pakar

1. Badan Pakar adalah badan yang membidangi kepakaran bagi kegiatan partai secara Profesional.
2. Badan Pakar dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari kalangan Partai Demokrat sesuai profesinya.
3. Badan Pakar bertugas untuk memberi masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat dalam mengambil keputusan penting baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 19
Badan Penelitian dan Pengembangan

1. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah badan tetap yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam masa waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan partai.
2. BALITBANG sebagai badan yang merupakan think tank organisasi diharapkan dapat memberikan analisa yang tajam, akurat, kredibel dan akuntable serta memiliki kepekaan dalam menghadapi berbagai permasalahan baik dalam maupun luar organisasi yang menyangkut sosial masyarakat demi kemajuan dan kebesaran partai

Pasal 20
Badan Pemenangan Pemilu

1. Badan Pemenangan Pemilu kepanjangan dari BAPPILU adalah badan tetap yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan tingkat kebutuhan
2. BAPPILU bertugas menyusun program, strategi dan cara Pemenangan Pemilu khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.
3. BAPPILU berfungsi sebagai badan yang dapat memberikan konsep-konsep Pemenangan Pemilu baik tingkat daerah maupun tingkat cabang, diharapkan sampai pada tingkat ranting sebagai kantong suara.

BAB III PIMPINAN DAERAH

Pasal 21 Dewan Pimpinan Daerah

1. Didalam suatu daerah Kelurahan/Desa atau daerah yang dipersamakan tingkatannya dengan Kelurahan/Desa, atau daerah lain yang karena keadaannya dapat dipersamakan dengan Kelurahan/Desa dan disana terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota Partai, dapat dibentuk Kantor Pimpinan Ranting.
2. Pengesahan berdirinya Pimpinan Ranting di Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.
3. Dalam suara daerah Kecamatan atau daerah yang dipersamakan tingkatnya dengan Kecamatan dapat dibentuk Dewan Pimpinan Anak Cabang.
4. Pengesahan berdirinya Dewan Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
5. Dalam suatu daerah Kabupaten/Kota atau daerah-daerah yang karena keadaannya dapat dipersamakan dengan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Dewan Pimpinan Cabang.
6. Pengesahan berdirinya Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
7. Bilamana terdapat Kekosongan Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi, maka Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mengadakan Rapat Pleno untuk mengusulkan salah seorang nama dan Pengurus Harian sampai ada ketentuan selanjutnya dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pasal 22 Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Keputusan Partai.
2. Menetapkan strategi dari perjuangan partai dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan Partai di daerahnya.
3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Cabang dan Anak Cabang didalam melaksanakan Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Partai serta ketentuan-ketentuan Partai.
4. Memberikan arahan atas kegiatan-kegiatan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

(lanjutan)

5. Mengatur keseragaman, kerja sama dan kordinasi perjuangan Partai didalam dan diluar Lembaga Negara di daerahnya.
6. Menyampaikan laporan lengkap kepada Musyawarah Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat tentang seluruh kebijaksanaan Dewan Pimpinan Daerah baik kedalam maupun keluar.
7. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah tentang pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Peraturan Partai dan Keputusan Musyawarah Daerah yang diamanatkan Kepada Dewan Pimpinan Daerah maupun kebijaksanaan yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Daerah baik ke dalam maupun keluar.
8. Mensahkan susunan Dewan Pimpinan Cabang
9. Memberhentikan sementara seorang anggota atau anggota pimpinan partai disemua tingkatan di bawahnya sebagaimana dimaksud pasal 5 diatas.

Pasal 23 **Hak Dewan Pimpinan Daerah**

1. Membuat peraturan-peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan garis-garis kebijaksanaan bagi kelancaran usaha-usaha Partai dalam rangka pelaksanaan Keputusan-Keputusan Kongres, Musyawarah Daerah dan Keputusan-Keputusan Partai.
2. Memberikan rekomendasi susunan dan komposisi Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan.
3. Memberhentikan sementara seorang anggota atau anggota pimpinan partai disemua tingkat yang berada dibawahnya sebagaimana dimaksud pasal 5 diatas.
4. Membatalkan suatu keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Cabang maupun Dewan Pimpinan Anak Cabang ataupun Keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Anak Cabang, apabila keputusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ataupun membahayakan keselamatan Partai, Negara dan Bangsa.
5. Bertindak mewakili Partai dalam menghadapi masalah-masalah Daerah dan dalam mengadakan hubungan kerja sama serta persahabatan di daerahnya sesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pasal 24
Dewan Pimpinan Cabang

1. Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Cabang yang merupakan Pimpinan Harian Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang untuk memimpin 1 (satu) periode masa jabatan antara 2 (dua) Musyawarah Cabang dan dapat dipilih kembali.
2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara dan para Anggota Majelis Pertimbangan Cabang, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang terpilih.
3. Ketentuan tersebut pada ayat 1 tidak mengurangi hak Musyawarah Cabang untuk menentukan cara lain bagi pemilihan Dewan Pimpinan Cabang maupun Majelis Perimbangan Cabang.
4. Susunan Dewan Pimpinan Cabang terpilih disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah
5. Untuk memperlancar tugas, Dewan Pimpinan Cabang membentuk seksi-seksi yang bidang dan jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
6. Kepala Seksi-seksi adalah anggota pleno Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
7. Bilamana terjadi kekosongan jabatan Ketua atau Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk mengusulkan salah satu pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk disahkan.

Pasal 25
Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang

1. Mengusahakan terlaksananya tujuan dan usaha-usaha Partai didaerah yang bersangkutan, menjalankan keputusan-keputusan dan garis-garis kebijakan partai atau instruksi-instruksi yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan menjalankan Keputusan Musyawarah Cabang.
2. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Anak Cabang Partai ditingkat Kecamatan dan Pimpinan Ranting di Partai di tingkat Kecamatan dan Pimpinan Ranting di tingkat Kelurahan/Desa didalam daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Partai serta ketentuan-ketentuan Partai.
3. Memberikan arahan atas kegiatan-kegiatan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Menyampaikan laporan lengkap kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah mengenai :

- a. Perkembangan Partai di daerahnya.
- b. Fakta-fakta dan data perkembangan politik dan lain-lain di daerahnya.

Pasal 26
Hak Dewan Pimpinan Cabang

1. Membuat peraturan-peraturan bagi kelancaran usaha-usaha Partai di daerahnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan atau peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
2. Mensahkan Susunan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
3. Mewakili Partai dalam tindakan keluar sejauh yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan daerah Cabangnya sesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) masing- masing.

Pasal 27
Pola Kerja Dewan Pimpinan Cabang

1. Dewan Pimpinan Cabang dalam kepengurusannya bekerja secara kolektif.
2. Dalam hal-hal yang mendesak, Ketua segera mengundang dan menyelenggarakan Rapat Pengurus Partai ditingkat Kecamatan dan Pimpinan Ranting ditingkat Kelurahan/Desa didalam daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan garis-garis kebijaksanaan Partai serta ketentuan-ketentuan Partai.
3. Memberikan arahan atas kegiatan-kegiatan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Menyampaikan laporan lengkap kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah,
 - a. Perkembangan Partai di daerahnya.
 - b. Fakta-fakta dan data perkembangan politik dan lain-lain di daerahnya.

Pasal 28
Dewan Pimpinan Anak Cabang

1. Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Anak Cabang yang merupakan Pimpinan Harian Anak Cabang dipilih oleh Musyawarah Anak Cabang untuk

(lanjutan)

memimpin 1 (satu) periode masa jabatan antara 2 (dua) Musyawarah Anak Cabang dan dapat dipilih kembali.

2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan para Anggota Majelis Pertimbangan Anak Cabang, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang terpilih.

3. Ketentuan tersebut pada ayat 1 (satu) tidak mengurangi hak Musyawarah Anak Cabang untuk menentukan cara lain bagi pemilihan Dewan Pimpinan Anak Cabang maupun Majelis Pertimbangan Anak Cabang.

4. Susunan Dewan Pimpinan Anak Cabang terpilih disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan.

5. Untuk memperlancar tugas, Dewan Pimpinan Daerah membentuk Sub seksi yang bidang dan jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.

6. Ketua-Ketua Sub seksi adalah Anggota Dewan Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 29

Kewajiban Dewan Pimpinan Anak Cabang

1. Mengusahakan terlaksananya tujuan dan usaha-usaha Partai di daerah yang bersangkutan, menjalankan ke Partai atau instruksi-instruksi Dewan Pimpinan Cabang dan menjalankan keputusan Musyawarah Anak Cabang

2. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Pimpinan Ranting ditingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan Keputusan- keputusan dan garis-garis kebijaksanaan serta ketentuan-ketentuan Partai.

3. Menyampaikan laporan lengkap kepada Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah, mengenai :

a. Perkembangan Partai di daerahnya.

b. Fakta-fakta dan data perkembangan politik dan lain-lain di daerahnya.

4. Menyampaikan pendapat dan aspirasi masyarakat didaerahnya kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 30

Hak Dewan Pimpinan Anak Cabang

Dewan Pimpinan Anak Cabang berhak :

1. Membuat peraturan-peraturan bagi kelancaran usaha-usaha Partai didaerahnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan atau peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

2. Mensahkan Pimpinan Ranting terpilih.
3. Mewakili Partai dalam tindakan keluar sejauh yang menyangkut dengan daerahnya sesuai petunjuk dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masing- masing.

Pasal 31

Dewan Pimpinan Ranting

1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara dipilih oleh Musyawarah Ranting.
2. Musyawarah Ranting untuk memimpin 1 (satu) periode masa jabatan untuk 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
3. Susunan Personalia Dewan Pimpinan Ranting disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan.

Pasal 32

Kewajiban Dewan Pimpinan Ranting

1. Melaksanakan kebijaksanaan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
2. Menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat didaerahnya kepada Dewan Pimpinan Anak Cabang.
3. Memimpin dan memberikan petunjuk-petunjuk dan penerangan kepada Anggota didaerahnya dalam rangka melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan Partai.
4. Mengurus dan menyelesaikan pendaftaran Anggota Partai.

Pasal 33

Hak Dewan Pimpinan Ranting

Pimpinan Ranting berhak :

1. Membuat peraturan-peraturan bagi kelancaran usaha-usaha Partai di daerahnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang lebih.
2. Mewakili Partai dalam tindakan keluar sejauh yang menyangkut dengan daerahnya sesesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) masing- masing.

(lanjutan)

Pasal 34
Pimpinan Anak Ranting

1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan para anggota yang merupakan Pimpinan Anak Ranting dipilih dari Anggota atau tokoh masyarakat untuk memimpin 1 (satu) periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
2. Susunan Pimpinan Anak Ranting terpilih disahkan oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 35
Kewajiban Pimpinan Anak Ranting

1. Melaksanakan kebijaksanaan dari Dewan Pimpinan Anak Cabang.
2. Menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat daerahnya kepada Dewan Pimpinan Anak Cabang.
3. Memimpin dan memberikan petunjuk-petunjuk dan penerangan kepada Anggota didaerahnya dalam rangka melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan Partai.
4. Mengurus dan menyelesaikan pendaftaran Anggota Partai.

Pasal 36
Hak Pimpinan Anak Ranting

1. Membuat peraturan-peraturan bagi kelancaran usaha-usaha Partai didaerahnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan atau peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
2. Mewakili Partai dalam tindakan keluar sejauh yang menyangkut dengan daerahnya, sesuai petunjuk dan Dewan Pimpinan Ranting masing-masing.

BAB IV
KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 37
Tingkatan Rapat-Rapat

1. Kongres, Musyawarah dan Rapat diadakan sebagai berikut
 - a. Tingkat Nasional adalah :
 - (1). Kongres.
 - (2). Kongres Luar Biasa.
 - (3). Rapat Pimpinan Nasional.
 - (4). Rapat Koordinasi Tingkat Nasional.
 - (5). Rapat Kerja Tingkat Nasional

b. Tingkat Daerah adalah :

- (1). Musyawarah Daerah
- (2). Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- (3). Rapat Koordinasi Daerah.
- (4). Rapat Kerja Tingkat Daerah.

c. Tingkat Cabang adalah :

- (1). Musyawarah Cabang.
- (2). Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- (3). Rapat Koordinasi Cabang.
- (4). Rapat Kerja Tingkat Cabang

d. Tingkat Anak Cabang adalah :

- (1). Musyawarah Anak Cabang.
- (2). Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
- (3). Rapat Koordinasi Anak Cabang.
- (4). Rapat Kerja Tingkat Anak Cabang.

e. Tingkat Ranting adalah :

- (1). Musyawarah Ranting.
- (2). Musyawarah Ranting Luar Biasa
- (3). Rapat Kerja Tingkat Ranting.

f. Tingkat Anak Ranting adalah :

- (1). Musyawarah Anak Ranting.
- (2). Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa
- (3). Rapat Kerja Tingkat Anak Ranting.

2. Rapat-Rapat Dewan Pimpinan dan Rapat Majelis Pertimbangan Partai disemua tingkat kepengurusan terdiri dari :

- a. Rapat Pleno Dewan Pimpinan.
- b. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan.
- c. Rapat Majelis Pertimbangan Partai.
- d. Khusus untuk tingkat Dewan Pimpinan Pusat diadakan Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Koordinasi Tingkat Nasional dan Rapat Kerja Nasional.

Pasal 38

Kongres

Kongres yang merupakan kekuasaan tertinggi Partai diadakan 5 (lima) tahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan-keputusan tentang :

1. Laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat.
2. Program Umum Partai untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

3. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
4. Masalah yang bertalian dengan kepentingan Bangsa dan Negara, khususnya yang menyangkut kepentingan rakyat.
5. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 39
Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa dapat diadakan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan didukung oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah dan Dewan Pimpinan Cabang dari masing-masing daerah bersangkutan.

Pasal 40
Peserta Kongres Atau Kongres Luar Biasa

1. Peserta Kongres atau Kongres Luar Biasa adalah Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
2. Jumlah peserta Kongres atau Kongres Luar Biasa terdiri dari seluruh Pengurus Dewan Pengurus Pusat, 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 2 (dua) orang dari setiap Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 41
Sahnya Kongres atau Kongres Luar Biasa

1. Kongres atau Kongres Luar Biasa adalah sah apabila dihadiri oleh sejumlah minimum 2/3 (dua pertiga) jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
2. Sidang-sidang Kongres adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah peserta Kongres.
3. Keputusan Kongres adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang hadir.
4. Keputusan Kongres tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang hadir.
5. Dewan Pimpinan Pusat, setiap Dewan Pimpinan Daerah dan setiap Dewan Pimpinan Cabang, masing-masing mempunyai 1 (satu) suara di Kongres.

Pasal 42
Acara dan Tata Tertib Kongres

Acara dan Tata Tertib Kongres ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 43

**Peserta Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa,
Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak
Cabang, Musyawarah Ranting**

1. Peserta Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah; unsur Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah dan unsur dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang.
2. Peserta Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah unsur Pengurus Harian Dewan Pim



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jakarta, 27 Juli 2005.

Nomor : C.UM.06.08.15
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur Utama Perusahaan
Umum
Percetakan Negara RI
Jl. Percetakan Negara No. 21
Di
JAKARTA.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-5.UM.06.08 Tahun 2005, tentang Pengesahan Pendaftaran Perubahan Kepengurusan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI DEMOKRAT, untuk diumumkan dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM
UMUM



ZULKARNAIN YUNUS, SH, MH
NIP. 040034478

Tembusan :

1. MAHKAMAH AGUNG RI
2. DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI
3. KOMISI PEMILIHAN UMUM
4. PENGURUS PUSAT PARTAI DEMOKRAT di Jakarta

Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat

Ketua Umum : Hadi Utomo, S.H., M.M.
 Wakil Ketua Umum : Prof. DR. H. Ahmad Mubarak, M.A.
 Sekretaris Jenderal : Amir Syamsuddin.
 Bendahara Umum : H. Zaenal Abidin

Ketua-Ketua

1 Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi : drh. Jhonny Allen Marbun
 2 Ekonomi dan Keuangan : Darwin Zahedy Saleh, S.E., M.BA.
 3 Politik : Anas Urbanigrum, S.E., M.A.
 4 Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga : Ir. Agus Hermanto, M.M.
 5 Pendidikan, Pemuda dan KOMINFO : Max Supacua, S.E., M.Sc.
 6 Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan : DR. Ir. Mohammad Jafar Hafisah
 7 KESRA (Sosial, Agama dan Kepercayaan) : DR (Hc) Agus Abubakar, Lc
 8 HANKAM : Drs. Nurfaizi, M.M.
 9 Kelestarian Alam, LH dan Bantuan Bencana Alam : dr. Akhmad Nizar Shihab
 10 Pertanahan, Pemukiman Sarana, Dan Prasarana : Drs. I Wayan Sugiana, M.M.
 11 Sumber Daya Manusia, INDAG, Perhubungan : G. Radittyo Gambiro, MBA
 12 Hukum, HAM, NAKER Buruh dan Nelayan : Amir Samsudin, S.H., M.H.
 13 Pariwisata, Seni dan Budaya : Drs. Parlindungan Hutabarat
 14 Pemberdayaan Perempuan : DR. Hj. Hamidah Hamid, M.Si.

Wakil - Wakil Sekjen

1 Wakil Sekjen 1 : Ir. Sabardi Dian Wiraan, M.Mw.
 2 Wakil Sekjen 2 : I Wayan Gunastra, S.E.
 3 Wakil Sekjen 3 : H. Tri Yulianto, S.H.
 4 Wakil Sekjen 4 : Angelina Sondakh, SE
 5 Wakil Sekjen 6 : DR. Syarif Hasan, S.E., M.M., M.BA.
 6 Wakil Sekjen 7 : Drs. Sukarnotomo
 7 Wakil Sekjen 8 : Yahya Sacawirya, S.IP
 8 Wakil Sekjen 9 : Ir. Milton Pakpahan, MM
 9 Wakil Sekjen 10 : Chandra Pratomo Samiaji Massaid
 10 Wakil Sekjen 11 : Fariani Sugiharto, B.Sc, MBA
 11 Wakil Sekjen 12 : Hendrik Lewerisa, S.H., M.H.
 12 Wakil Sekjen 13 : Mirwan Amir
 13 Wakil Sekjen 14 : Nurhayati Assegaf, SE

(lanjutan)

Wakil - Bendahara

- 1 Wakil Bendahara 1 : Nurhayati Pane, SH
- 2 Wakil Bendahara 2 : Jodi Haryanto, M.BA.
- 3 Wakil Bendahara 3 : dr. Indrawati Sukadis
- 4 Wakil Bendahara 4 : Donny Panduwinata
- 5 Wakil Bendahara 5 : Drs. Samuel Purba, MBA
- 6 Wakil Bendahara 6 : M. Nazaruddin, SE
- 7 Wakil Bendahara 7 : Anton Sukartono Suratto
- 8 Wakil Bendahara 8 : Drs. Saidi Butar-butur

Ketua - Ketua Departemen

- 1 Ketua Departemen Organisasi : Heriyanto
- 2 Ketua Departemen Keanggotaan : Drs. Umar Arsial
- 3 Ketua Departemen Kaderisasi : Edi Baskoro Yudhoyono
- 4 Ketua Departemen Makro Ekonomi : Ratnawati Wijaya, SE, MM
Keuangan
- 5 Ketua Departemen Koperasi dan : Ir. Made Sudiarsa
UKM
- 6 Ketua Departemen BUMN : Hartanto Edhie Wibowo
- 7 Ketua Departemen Pendidikan dan : Ruhut P. Sitompul, SH
Pembinaan Politik
- 8 Ketua Departemen Kebijakan Politik : Dasrul Djabar
dan Pemerintahan
- 9 Ketua Departemen Otonomi Daerah : T. Riefky Harsya
- 10 Ketua Departemen Luar Negeri : Drs. Victor Soedjono Hardi
- 11 Ketua Departemen Asosiasi Partai : Himatul Alia SH, MH.
Demokrat
- 12 Ketua Departemen Lembaga : Sutijpto, SH., MKN.
Internasional
- 13 Ketua Departemen Pendidikan : Vera Febyanthy, BBA
- 14 Ketua Departemen Pemuda : H. Pelly Yusuf
- 15 Ketua Departemen Kominfo : RM. Roy Suryo Notodiprojo
- 16 Ketua Departemen Kelautan dan : DR. Herman E. Khaeron
Perikanan
- 17 Ketua Departemen Pertanian : Nuraeni A. Barung
- 18 Ketua Departemen Kehutanan : Indria Octavia Muaja
- 19 Ketua Departemen Agama : Dr. Abdurrahman Bima, MA
- 20 Ketua Departemen Sosial : Sri Mulyono, S. Sos, MM
- 21 Ketua Departemen Kesehatan : dr. Lubna Anwar Sadat
- 22 Ketua Departemen Pertahanan : Drs. Jafar Nainggolan
- 23 Ketua Departemen Keamanan : Sudirman Panigoro, SH, MBA
- 24 Ketua Departemen Psikologi : Siti Mufattahah, S.Psi
- 25 Ketua Departemen Kelestarian dan : Susi Barbara, S.IP, MM
Pemanfaatan SDA
- 26 Ketua Departemen Lingkungan Hidup : Drs. H. Arief Pribadi
- 27 Ketua Departemen Bencana Alam : Sri Manulang

(lanjutan)

- 28 Ketua Departemen Pertahanan : Ir. H. Ricky Issoedibyo
- 29 Ketua Departemen Pemukiman : Kartini Istiqomah, SE
- 30 Ketua Departemen Sarana dan Prasarana : Ida Simamora, SE, MM
- 31 Ketua Departemen SDM : DR. Andi Alifian Mallarangeng
- 32 Ketua Departemen Industri dan Perdagangan : Nurcahyo Anggorojati
- 33 Ketua Departemen Perhubungan : Decky, SE
- 34 Ketua Departemen Hukum : Yosep B. Badeoba
- 35 Ketua Departemen Hak Azasi Manusia : Bertha Herawati, SH, MKN
- 36 Ketua Departemen Ketenagakerjaan : Dhiana Anwar
- 37 Ketua Departemen Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Ekonomi : Gaguk Subagyanto
- 38 Ketua Departemen Pengembangan Produk dan Pariwisata : Drs. Sofwan
- 39 Ketua Departemen Pengembangan Seni dan Budaya : Ida Riyanti
- 40 Ketua Departemen Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat Pariwisata : Usmawati Pieter
- 41 Ketua Departemen Perlindungan Perempuan : Siasmawarni, MC
- 42 Ketua Departemen Kesetaraan Gender : dr. Luky Azizah Bawazir
- 43 Ketua Departemen Optimalisasi Perempuan : Dr. Ratnasari Azhari, MPA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hasil wawancara dengan pihak Partai Demokrat
- Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Mantan Ketua BEM Seluruh Indonesia Periode 2008-2009
- Lampiran 3. ADART Partai Demokrat
- Lampiran 4. Dokumen pengesahan ADART Partai Demokrat
- Lampiran 5. Pengurus Harian DPP Periode 2004-2009

